

# JURNAL STUDI INOVASI

**Vol 2 No 2 April 2022**



Inovbook Publications



**Jurnal  
Studi Inovasi**

<https://jurnal.studiinovasi.id>



## **PEMIMPIN REDAKSI**

**Wanda Tifani Arantika**  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas Airlangga  
wandatifany@gmail.com

## **BAGIAN EDITOR**

**Wanda Tifani Arantika**  
wandatifany@gmail.com

**Siti Muntamah**  
sitim080@gmail.com

## **GRAFIS**

**Ali Mujahidin**

## **ASOSIASI EDITOR**

**Karina Idria Setyawati**  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas Airlangga

**Devita Ramadhani**  
**Kurniasari**  
Fakultas Teknologi Industri,  
Institut Teknologi Sepuluh  
Nopember

**Wahidah Mumtahanah**  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas Airlangga

**Fauziah Putri Indi**  
**Rahmawati**  
Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas  
Pembangunan Nasional  
Veteran Surabaya

**Amadea Fitri Syaharani**  
Fakultas Sains dan  
Teknologi, Universitas  
Airlangga

## **MITRA BESTARI**

**Leope Pinnega**  
Badan Kepegawaian dan  
Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Tulungagung

**Farid Pribadi**  
Universitas Negeri Surabaya

**Iman Iskandar**  
Badan Sumber Daya  
Manusia Kementerian Dalam  
Negeri

**Heri Wahyudianto**  
Badan Penelitian dan  
Pengembangan Provinsi  
Papua

**Agustinus Hartopo**  
Badan Penelitian dan  
Pengembangan Provinsi  
Papua

**Tedi Gunawan**  
Ritsumeikan University

**Adi Asmariadi Budi**  
Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Provinsi Lampung

**Ambar Rosidhah Qoonitah**  
Badan Pengawas Pemilu

**Adi Suhendra**  
Kementerian Dalam Negeri

**Firdaus Sany Lewenussa**  
The University of Sheffield,  
Inggris



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Studi Inovasi (JSI) Volume 2 Nomor 2, April 2022.

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta sumberdaya manusia maka hasil-hasil penelitian maupun sanggahan ilmiah inovasi perlu dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pembaca.

Dalam edisi ini disajikan 5 (lima) makalah yang meliputi: (1) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020, (2) Analisis SIG Berdasarkan Data Geologi dan Geospasial sebagai Inovasi Mitigasi Tanah Longsor Studi Kasus Daerah Wukirsari Imogiri, (3) Strategi Mempertahankan Perekonomian Keluarga Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pandemi Covid-19 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, (4) Inovasi Sosial Kebersihan : Studi Tentang Pendidikan Hidup Sehat di Komunitas Petojo Binatu RT 02 RW 08 Jakarta Pusat, (5) Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai Inovasi di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020

Terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan para fungsional lain yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan makalah untuk kelangsungan jurnal ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat diterbitkan..

Kami mengharapkan masukan saran dan kritik demi penyempurnaan terbitan selanjutnya, serta semoga kerjasama yang telah berjalan dapat ditingkatkan.

Bandung, April 2022

Redaksi



## DAFTAR ISI

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 <b>Belasari, Bustami Rahman, Ranto</b> .....	<b>1-16</b>
Analisis SIG Berdasarkan Data Geologi dan Geospasial sebagai Inovasi Mitigasi Tanah Longsor Studi Kasus Dae <b>Hafid Rizki Nur Rohman, Farizki Budi Pangestu, Aan Munandar</b> .....	<b>17-23</b>
Strategi Mempertahankan Perekonomian Keluarga Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pandemi Covid-19 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba <b>Hamidah Qur'anis, Putra Pratama Saputra, Fitri Ramdhani Harahap</b> .....	<b>24-30</b>
Inovasi Sosial Kebersihan : Studi Tentang Pendidikan Hidup Sehat di Komunitas Petojo Binatu RT 02 RW 08 Jakarta Pusat <b>Priantoro Krisie Nugroho</b> .....	<b>31-37</b>
Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai Inovasi di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020 <b>Renia, Bustami Rahman, Sarpin</b> .....	<b>38-50</b>



## HALAMAN INTISARI

e-ISSN : 2775-0922

Date of Issue: April 2022

Halaman ini dapat direproduksi atau disalin tanpa izin dari editor dan penulis

Belasari, Bustami Rahman, Ranto (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

*JURNAL STUDI INNOVASI, April 2022, vol 2, no 2, hal. 1-16, 3 g, 1 tab, 23 ref*

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Dibimbing oleh Bustami Rahman dan Ranto). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program dalam penanganan kawasan kumuh baik di Desa maupun di kota dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar untuk meningkatkan kawasan yang layak huni. Banyaknya wilayah kumuh baik di perkotaan maupun di Desa membuat pemerintah lebih jeli lagi dalam menghadapinya. Seperti halnya Pertumbuhan penduduk bisa menimbulkan munculnya kawasan permukiman kumuh yang sering dilihat sebagai suatu permasalahan dari setiap Daerah. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, salah satu program pemerintah adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Daerah yang dikatakan kumuh apabila mencakup tujuh aspek yaitu dilihat dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi parit-parit atau gorong-gorong (Drainase), kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi pengaman kebakaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dari William N Dunn untuk

menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Menurut William N Dunn dalam kebijakan publik ada beberapa tahapan yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Penelitian ini memfokuskan Implementasi program yang terdiri dari Proses pelaksanaan dan juga pencapaian apa saja yang telah dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif sumber data primernya adalah wawancara dengan 11 informan. Informan tersebut dari ketua penanggungjawab program ini, kepala Desa dan Lurah, Ketua LKM dari Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih maupun yang terakhir 3 masyarakat Kelurahan Tanjung dan 3 masyarakat Desa Air Putih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di kedua Daerah tersebut cukup berhasil. Dilihat dari proses pelaksanaan program ini, tepatnya di kedua Daerah mengalami perubahan yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya. Selanjutnya untuk pencapaian sendiri kedua Daerah tersebut sudah dibangun pembangunan infrastruktur agar masyarakat sekitar terbantu dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini, walaupun belum sepenuhnya terwujud dari beberapa aspek tersebut. Dengan hal ini untuk implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kedua Daerah tersebut cukup berhasil.

(author)

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penanggulangan Kemiskinan

Hafid Rizki Nur Rohman, Farizki Budi Pangestu, Aan Munandar (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Jl. Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55283)

Analisis SIG Berdasarkan Data Geologi dan Geospasial sebagai Inovasi Mitigasi Tanah Longsor Studi Kasus Daerah Wukirsari Imogiri

*JURNAL STUDI INNOVASI, April 2022, vol 2, no 2, hal. 17-23,  
3 g, 1 tab, 10 ref*

Indonesia merupakan negara dengan tingkat bencana tanah longsor yang tinggi, salah satunya yaitu Daerah Imogiri Bantul terutama Desa Wukirsari. Daerah Wukirsari merupakan daerah yang memiliki morfologi berupa perbukitan yang curah dan dilalui oleh jalur Sesar Opak sehingga mengakibatkan daerah tersebut rawan bencana tanah longsor yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun korban jiwa. Kondisi tersebut menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini dengan melakukan pengamatan kondisi geologi, tataguna lahan, curah hujan, dan kelerengan pada daerah tersebut untuk dilakukan analisis inovasi berbasis sistem informasi geografis yang menghasilkan peta tingkat kerentanan bencana tanah longsor pada daerah penelitian. Daerah penelitian memiliki morfologi perbukitan yang curam hingga terjal dengan batuan penyusun berupa batuan piroklastik yang tergabung dalam Formasi Semilir dan breksi vulkanik yang tergabung dalam Formasi Nglanggeran serta disusun oleh tanah latosol bertekstur lempung hingga pasir. Daerah penelitian juga dijumpai struktur geologi yang berkembang berupa patahan dan juga kondisi curah hujan lebih dari 2000mm/th dengan tataguna lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan. Penelitian ini menghasilkan peta zona kerentanan tanah longsor rendah, sedang, dan tinggi yang didominasi oleh kerentanan yang sedang. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai informasi utama dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor pada daerah Wukirsari, Imogiri, Bantul.

(author)

Kata kunci: Gerakan Tanah, Kecamatan Imogiri, SIG, Tumpang tindih berbobot, Zona rawan longsor

---

Hamidah Qur'anis, Putra Pratama Saputra, Fitri Ramdhani Harahap (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Strategi Mempertahankan Perekonomian Keluarga Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pandemi Covid-19 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba

*JURNAL STUDI INNOVASI, April 2022, vol 2, no 2, hal. 24-30,  
3 g, 1 tab, 13 ref*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa informan dan data sekunder berupa dokumen dan literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi antar individu dapat membentuk modal sosial yang kuat sehingga mampu membentuk jaringan sosial di dalam suatu kelompok. Modal sosial yang dimiliki oleh desa Kurau Barat dengan

UMKM yang ada sangat dirasakan keberadaannya sehingga memberikan hasil yang efektif terhadap pengembangan usaha yang mereka kelola, Peran modal sosial di dalam masing-masing individu mempengaruhi kapasitas dan kualitas di dalam desa tersebut. Modal sosial yang didayagunakan secara efektif dapat memberikan dorongan untuk pengembangan usaha. Pengembangan secara internal dari kelompok usaha "Getas dan Ampiang" dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, fasilitasi dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan bahan baku, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana.

(author)

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, UMKM, Strategi, Perekonomian, Keluarga.

---

Priantoro Krisie Nugroho (Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No.2 Kota Serang)

Inovasi Sosial Kebersihan : Studi Tentang Pendidikan Hidup Sehat di Komunitas Petojo Binatu RT 02 RW 08 Jakarta Pusat

*JURNAL STUDI INNOVASI, April 2022, vol 2, no 2, hal. 31-37, 3  
g, 1 tab, 15 ref*

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan perilaku sosial yang terjadi pada komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08. Perubahan sosial terjadi sejak hadirnya program-program kebersihan yang diprakarsai oleh lembaga asing yaitu USAID (United States Agency for International Developments) yang dibantu oleh lembaga lokal seperti Mercy Corps. Pada awalnya, kawasan Petojo Binatu lebih dikenal sebagai salah satu wilayah kumuh atau slump area di Jakarta. Akan tetapi, sejak bergulirnya program kebersihan yaitu MCK Plus pada tahun 2007, kini wilayah Petojo Binatu berubah menjadi kawasan percontohan.

(author)

Kata Kunci : MCK Plus, Perilaku, Program Kebersihan, Komunitas

---

Renia, Bustami Rahman, Sarpin (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai Inovasi di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020

Implementasi merupakan suatu aktivitas, aksi dan tindakan. Namun, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas biasa, melainkan pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui politik implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai landasan dasar penelitian. Terkait konsep implementasi kebijakan tersebut terdapat dua variabel besar yakni, yang pertama isi kebijakan yang terdapat enam indikator lainnya yaitu; a) kepentingan kelompok sasaran (target group). b) jenis dan manfaat yang diterima oleh target group. c) derajat perubahan yang diinginkan. d) letak sebuah program. e) pelaksanaan program atau implementor. f) sumber daya. Kemudian yang kedua berdasarkan lingkungan kebijakan terdapat tiga indikator lainnya yaitu: a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) karakteristik lembaga dan penguasa c) kepatuhan dan daya tanggap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba sudah terimplementasi walaupun berjalan kurang efektif. Berdasarkan dari beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan menurut Grindle terdapat beberapa yang kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakan program BSPS di Desa Jelutung II. Hal tersebut terlihat dari pada saat penentuan calon penerima bantuan masih terdapat penerima yang kurang tepat serta adanya keterlambatan barang bangunan dan keterbatasan dari anggaran yang ada dari penerima bantuan. Faktor pendukung dari program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, kualitas bahan bangunan yang bagus. Adapun faktor penghambatnya ialah cuaca, ketersediaan tukang bangunan dan keterlambatan bahan bangunan.

(author)

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, BSPS, Desa Jelutung II.



#### Korespondensi

Email<sup>1</sup> : [belasari2399@gmail.com](mailto:belasari2399@gmail.com)

Email<sup>2</sup> : [bustami.rahman@gmail.com](mailto:bustami.rahman@gmail.com)

Email<sup>3</sup> : [rantopalempat@gmail.com](mailto:rantopalempat@gmail.com)



Inovbook Publications

Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

# IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) SEBAGAI INOVASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2020

**Belasari<sup>1\*</sup>, Bustami Rahman<sup>2\*</sup>, Ranto<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,  
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 April 2022

#### Abstract

*Implementation of the City Without Slums (KOTAKU) Program in Reducing Community Poverty in Muntok District, West Bangka Regency 2016-2020 (Supervised by Bustami Rahman and Ranto) The City Without Slums Program (KOTAKU) is a program in handling slum areas both in villages and in cities in poverty alleviation. This program has the aim of increasing public access to infrastructure and basic services to improve livable areas. The number of slum areas in both urban and rural areas makes the government more observant in dealing with them. Like population growth, it can lead to the emergence of slum areas which are often seen as a problem for every region. To reduce these problems, one of the government's programs is the City Without Slums Program (KOTAKU). The purpose of this study was to determine the implementation process and the achievements that have been achieved by the City Without Slums Program (KOTAKU). The theory used in this study is the public policy theory of William N Dunn to analyze the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU). According to William N Dunn in public policy there are several stages, namely agenda setting, policy formulation, policy implementation and policy assessment. This research focuses on program implementation which consists of the implementation process and also what achievements have been achieved. The method used in this research is descriptive qualitative method, the primary data source is interviews with 11 informants. The informants were from the head in charge of this program, the village head and the Lurah, the head of the LKM from the Tanjung and Air Putih villages as well as the last 3 people from the Tanjung village and 3 from the Air Putih village. The results of this study indicate that the evaluation in the two regions was quite successful. Judging from the process of implementing this program, to be precise in the two regions, there have been changes from slums to less slums. Furthermore, for the achievement of the two regions, infrastructure development has been built so that the surrounding community is helped by the Cities Without Slums (KOTAKU) Program, although it has not been fully realized from some of these aspects. With this, the evaluation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in the two regions was quite successful.*

**Keywords:** Public Policy, Implementation, Evaluation, City Without Slums Program (KOTAKU), Poverty Alleviation

## Abstrak

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Dibimbing oleh Bustami Rahman dan Ranto). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program dalam penanganan kawasan kumuh baik di Desa maupun di kota dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar untuk meningkatkan kawasan yang layak huni. Banyaknya wilayah kumuh baik di perkotaan maupun di Desa membuat pemerintah lebih jeli lagi dalam menghadapinya. Seperti halnya Pertumbuhan penduduk bisa menimbulkan munculnya kawasan permukiman kumuh yang sering dilihat sebagai suatu permasalahan dari setiap Daerah. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, salah satu program pemerintah adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Daerah yang dikatakan kumuh apabila mencakup tujuh aspek yaitu dilihat dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi parit-parit atau gorong-gorong (Drainase), kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi pengaman kebakaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dari William N Dunn untuk menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Menurut William N Dunn dalam kebijakan publik ada beberapa tahapan yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Penelitian ini memfokuskan Implementasi program yang terdiri dari Proses pelaksanaan dan juga pencapaian apa saja yang telah dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif sumber data primernya adalah wawancara dengan 11 informan. Informan tersebut dari ketua penanggungjawab program ini, kepala Desa dan Lurah, Ketua LKM dari Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih maupun yang terakhir 3 masyarakat Kelurahan Tanjung dan 3 masyarakat Desa Air Putih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di kedua Daerah tersebut cukup

berhasil. Dilihat dari proses pelaksanaan program ini, tepatnya di kedua Daerah mengalami perubahan yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya. Selanjutnya untuk pencapaian sendiri kedua Daerah tersebut sudah dibangun pembangunan infrastruktur agar masyarakat sekitar terbantu dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini, walaupun belum sepenuhnya terwujud dari beberapa aspek tersebut. Dengan hal ini untuk implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kedua Daerah tersebut cukup berhasil.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Implementasi, Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penanggulangan Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Tujuannya agar tercapai peningkatan infrastruktur serta pelayanan dasar di permukiman kumuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Undang-undang tersebut perlu dibina dalam mendukung penataan, pengembangan wilayah serta dapat meningkatkan daya guna maupun hasil sumber daya alam yang tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan baik di Desa dan Perkotaan. Salah satu Daerah di Indonesia yang menerapkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat yang mengalami beberapa perubahan yaitu:

1. Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Nomor: 118.45/391/1.06.01/2014 yang disahkan oleh Bupati Bangka Barat Ust. H. Zuhri M. Syazali yang ditetapkan pada tanggal 09 September 2014.
2. Perubahan kedua atas keputusan Bupati Bangka Barat yaitu nomor: 188.45/295/4.3.1/2017 yang disahkan oleh Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2017.

3. Selanjutnya keputusan terbaru atas perubahan kedua yaitu nomor: 188.45/595.A/4.3.1.1/2018 yang disahkan oleh Bupati Bangka Barat H. Parhan Ali ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018.

Disahkannya keputusan tersebut karena Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu program yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sendiri adalah program Pemerintah yang berupaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh baik di Perkotaan maupun Desa. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terdiri dari beberapa aspek seperti kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase (saluran air) lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi pengamanan (Proteksi) kebakaran.

Kabupaten Bangka Barat Pemerintahannya dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat memiliki enam Kecamatan yaitu terdiri dari Muntok, Simpang Teritip, Kelapa, Tempilang, Jebus dan Parittiga. Situasi mengenai sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat mengalami berbagai macam problematika. Salah satunya ialah kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan Badan Pusat Statistik penduduk yang dikategorikan miskin di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016-2020 yaitu:

**Tabel 1.** Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2020

Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Tahun 2016	550	2.74 %
Tahun 2017	610	2.98 %
Tahun 2018	640	3.05 %
Tahun 2019	565	2.67 %
Tahun 2020	583	2.70 %

Sumber: (didapatkan dari [bangkabaratkab.bps.go.id](http://bangkabaratkab.bps.go.id))

Adapun lokasi sasaran yang di jadikan sebagai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Muntok adalah tiga Kelurahan dan

empat Desa yaitu Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Tanjung, Desa Air limau, Desa Air Putih, Desa Air Belo dan Desa Belolaut. Namun peneliti hanya mengambil satu Kelurahan dan satu Desa saja sebagai perwakilan untuk mengimplementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU yaitu Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih kenapa mengambil Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih, agar peneliti lebih fokus untuk menganalisis tentang implementasi dan tidak menjadikan semua Kelurahan/Desa sebagai lokasi dari penelitian peneliti.

Dari data yang telah diperoleh peneliti, masalah yang muncul adalah permukiman kumuh yang menjadi masalah sebagian masyarakat di Kota maupun Desa dikarenakan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi pengamanan (Proteksi) kebakaran. Sehingga dalam hal ini Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam mengurangi masalah kemiskinan dan sekaligus untuk memperbaiki masalah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dari fakta tersebut sehingga perlu adanya penelitian tentang implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana agar dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Sebagai bahan pelengkap juga kita dapat menganalisis data yang sudah ada entah itu dalam bentuk dokumen resmi, laporan, media dan sumber informasi data. Menurut Lisa Harrison (2007:91) berpendapat dalam riset Kualitatif deskriptif kita dapat memilih dan mengumpulkan data primer dan kita juga dapat melakukan dengan dua alat riset seperti wawancara maupun observasi.

### Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian ini terhitung dari bulan September 2021 hingga Desember

2021. Lokasi Penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu di Kabupaten Bangka Barat yang tepatnya di Kecamatan Muntok dan lokasinya ada di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih agar lebih memudahkan peneliti untuk turun lapangan.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah orang, tempat (desa atau tempat- tempat yang berkaitan dengan judul peneliti). Adapun subjek penelitian ini adalah Pihak yang berkaitan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kepala Desa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan juga masyarakat. Teknik dalam penentuan informan sendiri bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan informan dan tidak menjadikan keseluruhan masyarakat sebagai informan.

### **Prosedur**

Informan sendiri adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2020. Setelah itu untuk memperoleh informan tersebut peneliti melakukan melalui Purposive sampling yang sesuai dengan judul peneliti.

Pengumpulan data peneliti menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara mendalam**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan wawancara. Sehingga harapannya hasil dari wawancara berbagai pihak tersebut mendapat hasil yang relevan dan teruji kebenaran datanya. Dalam penelitian ini tujuan wawancara agar pertanyaan yang diajukan benar dan dapat dengan mudah diolah kembali oleh peneliti.

#### **2. Observasi**

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi adalah teknik yang pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung dan juga membuat catatan yang relevan terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Selanjutnya peneliti juga melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi adalah teknik pengumpulan untuk mendapatkan data sekunder dari data-data yang berkaitan dengan informasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut. Dan juga data- data atau informasi dari internet yang berbentuk jurnal, skripsi, berita maupun artikel yang digunakan peneliti untuk menambah data atau informasi dalam penelitian ini.

### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk sumber data atau informasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri data yang di dapatkan langsung oleh peneliti dilapangan atau objek utama yang diamati secara langsung dan juga buku utama yang menjadi referensi dan lain- lain (Rahman dan Ibrahim 2009:42). Terakhir data sekunder sendiri didapatkan dari sumber penunjang maupun sumber tambahan seperti buku- buku, dokumen peraturan dan lain- lain yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016-2020.

### **Teknik Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dengan hal ini maka data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik Kualitatif yang masih melibatkan angka- angka. Langkah- langkah tersebut adalah reduksi data merupakan data mentah yang dapat memilih dan memilah karena masih beragam untuk dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan tujuan agar data yang sudah dikelompokkan dengan mudah di cermati. Penyajian data merupakan data yang sudah diolah dan didapatkan oleh peneliti yang berupa table, grafik, matriks, grafik maupun lain- lain sebagainya. Tujuannya agar peneliti dengan mudah mempelajari data dengan mudah. Dan terakhir penarikan kesimpulan

merupakan tahapan untuk pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian yang dimana data telah disusun oleh peneliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten yang menerima Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang berdasarkan keputusan Bupati Bangka Barat. Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih yang menerima program ini. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut yang beberapa kali mengalami perubahan pasti adanya perbincangan mengenai program ini, kenapa harus diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sehingga masih banyak dari sebagian masyarakat yang belum tahu mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Inovasi diperlukan agar menyempurnakan Program sebelumnya yaitu PNPM Mandiri Perkotaan.

#### **A. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meresmikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Sebelum adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program yang terlebih dahulu adalah program PNPM mandiri perkotaan yaitu program untuk mengurangi kemiskinan yang berganti nama menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang memiliki inovasi dalam penanggulangan kemiskinan, yang membedakan PNPM dengan KOTAKU adalah PNPM sendiri lebih mengutamakan sikap, perilaku masyarakat yang dilihat hanya fokus ke masyarakatnya saja sedangkan KOTAKU tentunya dalam hal pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif didalam Program ini.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena Program ini adalah Program lanjutan dari PNPM mandiri perkotaan yaitu program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Seiring waktu berjalan PNPM mandiri perkotaan berubah nama menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang memiliki tujuan dalam pembangunan infrastruktur untuk kawasan kumuh dan tidak menyampingkan juga masyarakat miskin didalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, untuk Kabupaten Bangka Barat Baru terlaksana di

Kecamatan Muntok dan peneliti memfokuskan pada Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih. Dari keterangan tersebut setelah diresmikannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), peneliti melihat pada proses pelaksanaan di Kecamatan Muntok dan lokasinya berada di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih.

#### **B. Proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dalam pelaksanaannya berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Daerah maupun termasuk peran dari masyarakat di dalam Program ini. Proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bangka Barat yang tepatnya di Kecamatan Muntok dilakukan dalam empat tahap yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan**

Tahapan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, setelah diresmikannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang program ini masih berjalan. Tahapan persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, kontribusi pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dengan kata lain agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan sebaik-baiknya. Tahapan persiapan dimulai dari Pembentukan penanggungjawaban Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Melalui surat keputusan dari Bupati membentuk penanggungjawab agar mempermudah dalam menangani masalah-masalah di masyarakat, Kegiatan tahap sosialisasi awal mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang tentunya didampingi oleh pihak LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) yaitu lembaga pimpinan himpunan masyarakat ditingkat Desa atau Kelurahan.

Tujuan diadakan sosialisai agar masyarakat mengetahui mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) karena peran masyarakatlah yang terpenting dalam melakukan pelaksanaan pembangunan. Dan

yang terakhir Membangun visi permukiman, dalam membangun visi tersebut dimaksudkan mengajak seluruh pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk bersama-sama dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sehingga apa yang diharapkan akan terjadi pada masa depan.

## 2. Tahapan Perencanaan

Dilaksanakannya tahapan perencanaan agar pembangunan tersusun secara struktur karena tahapan perencanaan merupakan bagian dari tahapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kegiatan yang ada pada tahap perencanaan seperti survei lokasi, ditentukan agar tidak menjadikan semua Daerah sebagai kawasan kumuh, untuk menentukan lokasi apakah Desa atau Kelurahan tersebut merupakan kawasan kumuh/permukiman kumuh, dengan cara Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat dilihat dari beberapa aspek kumuh yaitu Kondisi bangunan gedung, Kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, Kondisi parit-parit atau gorong-gorong (drainase) lingkungan, Kondisi pengelolaan air limbah, Kondisi pengelolaan persampahan dan Kondisi pengaman (proteksi) kebakaran.

## 3. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan yang paling penting dari proses Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di tingkat Daerah. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan sosial, ekonomi maupun kegiatan infrastruktur. Dalam pelibatan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan diawali dengan adanya sosialisasi dari pihak-pihak yang bertanggungjawab (LKM). Kegiatan dari LKM sendiri dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat yaitu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian agar masyarakat tahu mengenai kondisi wilayahnya.

## 4. Tahapan keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan adalah tahapan akhir dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mana tahapan setelah pelaksanaan. Kegiatan dari tahapan keberlanjutan yaitu monitoring dan

implementasi setiap kegiatan dan pengembangan kapasitas.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) setelah peneliti turun lapangan, temuan di lapangan berdasarkan lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih yaitu:

### a. Kelurahan Tanjung

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung lokasinya berada di Daerah pesisir pantai tepatnya di Tanjung Laut RW.014, yang mana untuk luas kumuh Kelurahan Tanjung yang awalnya sebesar 16 Hektar dan pada tahun 2019 yang dananya di dapatkan dari sumber APBN (anggaran pendapatan belanja nasional) yang membantu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sehingga setelah adanya dana tersebut, kekumuhan di Kelurahan Tanjung Berkurang dari 16 Hektar menjadi 4,61 Hektar sekarang.

Dengan hal ini, kekumuhan menjadi berkurang dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dari tahun 2016-2020 di Kelurahan Tanjung yaitu Pada tahun 2016-2018 untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung, belum adanya pembangunan infrastruktur namun sudah ada kegiatan seperti Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh penanggungjawaban Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) contohnya seperti peminjaman modal.

Pada tahun tersebut program ini baru menggerakkan untuk sosialisasi atau mengajak peran masyarakat terlebih dahulu seperti pemberdayaan masyarakat, karena Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut untuk berpartisipasi. Peran masyarakatlah yang terpenting untuk program ini tanpa adanya dukungan dari masyarakat program ini belum tentu berjalan sampai sekarang ini. Kelurahan Tanjung pada Tahun 2020 tidak ada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikarenakan program ini setiap tahunnya beda-beda tempat sehingga untuk tahun 2020 di Desa Air Putih yang mendapatkan alokasi

dana untuk dibangunnya infrastruktur. Baru pada tahun 2020 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berada di Desa Air Putih.

Kenapa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dibangunnya infrastruktur sedangkan di Desa Air Putih lebih pada UMKM. Karena, di Kelurahan Tanjung pembangunan belum ada sama sekali apalagi untuk kawasan kumuh tersebut lingkungannya sangat kumuh. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan jembatan dan masih banyak lagi. Namun, di Desa Air Putih pembangunannya meliputi UMKM karena Desa Air putih membangun Desa agrowisata sebagai destinasi dari Desa. Dengan hal ini maka pembangunan infrastruktur itu lebih pada UMKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### b. Desa Air Putih

Tahun 2020 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berada di Desa Air Putih, yang mana pembangunan di Desa ini lebih mengutamakan pembangunan untuk UKM. Sumber anggarannya didapatkan dari APBN (anggaran pendapatan belanja nasional), dari anggaran tersebut kegiatan yang ada di Desa Air Putih sudah berjalan seperti rumah galeri, rumah produksi. Salah satu produksi dari masyarakat utama adalah buah keranji dan pemasarannya di rumah galeri.

Tahun 2016-2019 di Desa Air putih juga sama belum adanya pembangunan infrastruktur dan baru penanggungjawaban menggencarkan untuk sosialisasi atau mengajak peran masyarakat terlebih dahulu, seperti halnya pada pemberdayaan masyarakat karena Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Untuk pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut untuk berpartisipasi karena peran masyarakatlah yang terpenting untuk program ini, jadi untuk tahun 2016-2019 kegiatannya pemberdayaan masyarakat seperti contohnya peminjaman modal untuk usaha.

Pada tahun 2020 baru adanya pembangunan infrastruktur karena

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari tahun ke tahun beda untuk lokasinya seperti pada tahun 2019 di Kelurahan Tanjung dan tahun 2020 di Desa Air Putih. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Air Putih lokasinya berada di Dusun Kemang Masem dibangunnya infrastruktur untuk program ini.

#### C. Pencapaian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Pencapaian adalah suatu yang telah dicapai oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa/Kelurahan sehingga apa saja yang telah dicapai tersebut dapat mengurangi kekumuhan seperti pada lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih yaitu:

##### 1. Kelurahan Tanjung

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung berada di Daerah Pesisir Pantai tepatnya di RW.14, yang dimana untuk Tahun 2016-2018 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) itu belum adanya pembangunan infrastruktur karena kegiatannya baru pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pada tahun 2019 baru adanya pembangunan infrastruktur. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2019 dialokasikan ke Kelurahan Tanjung dan tahun 2020 dialokasikan ke Desa Air Putih. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jembatan, jalan setapak, drainase lingkungan (gorong-gorong) dan pembangunan tempat limbah untuk toilet yang dananya di dapatkan dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Pencapaian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung RW.14 adalah:

##### a. Jembatan

Temuan di lapangan untuk jembatan sendiri dibuat karena memang untuk Daerah tersebut belum adanya jembatan. Sehingga, sebelum adanya jembatan masyarakat disana sangat kesusahan apalagi untuk pergi ke Pusat kotanya dan

dalam pembuatannya bergotong royong bersama masyarakat dan didampingi oleh penanggungjawab Program KOTAKU maupun LKM (lembaga kesewadayaan masyarakat). Berikut ini adalah pencapaian hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung RW.14 Daerah tersebut berada di lokasi pesisir pantai:



**Gambar 1.** Jembatan di Masyarakat Pesisir Pantai RW.14 Kelurahan Tanjung, Pencapaian Hasil Program KOTAKU

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa jembatan tersebut sudah dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2019. Jembatan ini dalam pembangunan dikerjakan oleh masyarakat Daerah kawasan kumuh (gotong royong) yang dibantu oleh pihak LKM sendiri. Dengan seperti ini kekumuhan di RW.14 tersebut berkurang dari yang awalnya jalan tersebut adalah aliran air sehingga dibangun jembatan membuat lebih asri lagi tempatnya. Kondisi ini membuat jalan lingkungan dan bangunan sekitar menjadi rapi dan tidak menimbulkan kekumuhan baru lagi.

#### b. Jalan beton

Jalan beton adalah jalan yang dibangun pada kawasan kumuh seperti jalan penghubung antara rumah yang satu ke rumah yang lainnya agar mempermudah masyarakat untuk beraktifitas. Berikut ini adalah gambar dari jalan setapak dalam kawasan kumuh:



**Gambar 2.** Jalan Setapak dari Pencapaian Program KOTAKU di Masyarakat Pesisir Pantai Kelurahan Tanjung RW.14

Dapat dilihat dari gambar diatas jalan tersebut dibuat agar mempermudah masyarakat untuk beraktifitas keluar rumah dan jalannya pun tidak lebar-lebar hanya untuk motor saja yang dapat dilalui dan untuk mobil tidak bisa dilalui. Melihat seperti ini bahwa tempat ini yang awalnya tidak dibuat sama sekali dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menjadi adanya kemajuan. Sehingga kekumuhan di Daerah tersebut menjadi berkurang, untuk pembangunannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berkerjasama dengan masyarakat dan LKM dalam membangun jalan tersebut.

#### c. Drainase Lingkungan

Drainase adalah istilah dari gorong-gorong yang dibuat agar air hujan dapat mengalir dan tidak menimbulkan genangan air, untuk Kelurahan Tanjung pemasangan gorong-gorong dilakukan agar air hujan dapat mengalir dan tidak menggenang ke permukiman masyarakat.

#### d. Pembangunan tempat pembuangan limbah

Pencapaian selanjutnya yaitu adalah tempat limbah pembuangan akhir dimana bangunan tersebut dibangun untuk mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari. Bangunan tersebut tidak jauh dibangun dekat dengan jembatan. Berikut ini adalah gambar dari bangunan tempat limbah:



**Gambar 3.** Bangunan Tempat Limbah di Masyarakat Pesisir Pantai Kelurahan Tanjung RW.14

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa bangunan tempat limbah sudah dibangun dari hasil Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dalam pembangunannya berkerjasama dengan msasyarakat dan pihak LKM , namun dapat dilihat dari gambar tersebut kondisi dari bangunan tempat limbah sudah hampir tidak dirawat.

e. Penyediaan tempat air minum

Daerah pesisir pantai RW.14 untuk penyediaan air minum belum tersedia sama sekali atau belum adanya pembangunan mengenai penyediaan air minum ini.

f. Kondisi pengelolaan pesampahan

Daerah ini belum adanya pengelolaan persampahan apalagi disetiap rumah belum tersedia tong sampah sehingga membuat sampah-sampah rumah tangga berserakan.

g. Kondisi pengaman (proteksi) kebakaran

Daerah ini belum tersedia untuk pengaman proteksi kebakaran.

2. Desa Air Putih

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Air Putih bertempat lokasi di Dusun Kemang Masam bangunan infrastrukturnya, yang dimana untuk Tahun 2016-2019 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) itu belum adanya pembangunan infrastruktur karena kegiatannya baru pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pada tahun 2020 baru adanya pembangunan infrastruktur di Desa Air Putih. Program ini dimulai pada Desa Air Putih pada tahun 2020 dikarenakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari tahun ke tahun beda

untuk lokasinya seperti pada tahun 2019 di Kelurahan Tanjung dan tahun 2020 di Desa Air Putih. Desa Air Putih ini dibangun lebih kepada pembangunan infrastruktur untuk UKM (usaha kecil dan menengah) di Desa Air Putih, Pencapaian beberapa bangunan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) seperti rumah produksi, jalan beton, pasar khusus (galeri/ruang pameran), drainase lingkungan dan jalan paving block.

a. Bangunan rumah produksi

Rumah produksi dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola berbagai macam olahan seperti olahan buah keranji yang menjadi distinasi dari Desa Air Putih dan masih banyak lagi, bangunan tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:



**Gambar 4.** Rumah Produksi Program KOTAKU di Desa Air Putih Dusun Kemang Masam

Dapat dilihat dari rumah produksi ini yaitu tempat untuk mengolah berbagai jenis macam olahan keranji seperti manisan keranji, keranji kupas untuk membuat olahan tersebut sangatlah rumit. Sehingga dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini membangun bangunan rumah produksi agar masyarakat terutama ibu rumah tangga dapat mengisi waktu luang dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan kembali. Buah keranji sendiri untuk panennya sangatlah susah karena yang kita ketahui bahwa keranji untuk panennya 3 tahun sekali.

b. Jalan Beton

Jalan beton dibuat agar mempermudah masyarakat karena jalan untuk menuju ke tempat bangunan dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebelumnya tidak bagus sehingga dibuatlah jalan beton ini, dalam pembuatan jalan tersebut dibantu oleh tukang dan masyarakat yang bergotong

royong, berikut ini adalah gambar dari jalan beton tersebut:



**Gambar 5** Jalan Beton di Desa Air Putih Dusun Kemang Masam

Dari gambar tersebut jalan yang dibuat dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terlihat sangat rapi dibuat, jalan ini sangat membantu karena mempermudah masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan. Pencapaian ini adalah hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk masyarakat Desa Air Putih Dusun Kemang Masam.

c. Pasar khusus (galeri/ruang pameran)

Pasar khusus ini diolah oleh masyarakat Desa Air putih untuk menjual berbagai macam olahan dari Desa Air Putih seperti olahan keraji dan masih banyak lagi. Bangunan ini dibuat dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) agar masyarakat mempunyai aktifitas kegiatan yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai caranya berbisnis. Berikut ini adalah gambar dari rumah produksi:



**Gambar 6.** Rumah Produksi di Desa Air Putih Dusun Kemang Masam

Dari gambar diatas bahwa rumah produksi tersebut adalah rumah untuk pemasaran dari berbagai olahan karena Desa Air Putih ini untuk khas dari Desa yaitu Buah Keranji yang harus dikembangkan. Bangunan ini dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dimana inilah yang dapat membantu masyarakat dalam memasarkan hasil dari Desa mereka.

d. Drainase lingkungan

Drainase lingkungan lebih pada pembuatan gorong-gorong agar air hujan tidak menggenang sehingga dibuatlah gorong-gorong dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

e. Jalan paving block

Jalan ini tidak mencakup keseluruhan bangunan yang dibangun namun hanya pada bagian depannya saja yaitu pada awal masuk rumah galeri. Berikut ini adalah gambar dari jalan paving block:



**Gambar 7.** Jalan Paving Block di Desa Air Putih Dusun Kemang Masam

Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa jalan paving block dibangun agar mempermudah pengunjung untuk datang ke pasar galeri dari Desa Air Putih Dusun Kemang Masam. Pencapaian ini adalah hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Berdasarkan hasil dari pencapaian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini dapat membantu masyarakat miskin di kawasan kumuh, karena dengan adanya program ini membuat masyarakat di kedua Daerah tersebut menjadi sangat terbantu. Berdasarkan hasil dari pencapaian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini dapat membantu masyarakat miskin di kawasan kumuh, karena dengan adanya program ini membuat masyarakat di kedua Daerah tersebut menjadi sangat terbantu. Selanjutnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki manfaat, dapat memecahkan masalah dan bersifat nyata termasuk juga kedalam kebijakan publik yang dimana dari keputusan Bupati Bangka Barat. Kebijakan publik memiliki kaitan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Peneliti menggunakan teori ini agar mempermudah dalam menganalisis dari implementasi Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU), sehingga dari judul penelitian ini merupakan bagian kebijakan publik yang dipelajari dalam Ilmu Politik. Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dapat dilihat dari berbagai cara yaitu:

1. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memberikan manfaat bagi masyarakat maupun Negara.

- a. Kelurahan Tanjung

Kelurahan Tanjung adalah salah satu daerah yang mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari Program Kota Tanpa Kumuh lokasinya berada di RW.14 pesisir pantai. Untuk manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu adanya prasana dan sarana yang dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini sehingga keuntungannya yaitu sama-sama menguntungkan baik untuk masyarakat maupun Negara.

- b. Desa Air Putih

Desa Air Putih juga mendapatkan bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dimana mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur untuk UKM. Adanya manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu adanya pembangunan infrastruktur tersebut di Dusun Kemang Masam sehingga baik Negara maupun masyarakat dapat keuntungan masing-masing.

2. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan juga dapat memecahkan masalah - masalah masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini selain dapat memecahkan masalah di masyarakat yaitu dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan seperti adanya bantuan pembangunan infrastruktur yang tentunya melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Dengan adanya program ini masyarakat seperti kuli bangunan dapat bekerja di dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program tersebut telah mencapai tujuan yang dicanangkan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dari tahun 2016-2020 di Kecamatan Muntok tepatnya di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih sudah hampir sepenuhnya tercapai namun untuk mendapatkan kesempurnaan membutuhkan banyak waktu.

Dari kebijakan tersebut maka yang terakhir yaitu rekomendasi mengenai program yang dimana untuk mengevaluasi menggunakan pendapat dari William N Dunn, beliau menjelaskan terdapat enam tipe kriteria dalam implementasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan terakhir Ketepatan.

#### **D. Rekomendasi Evaluasi Program**

Dari penelitian dilapangan yang dimana menunjukkan bahwa terdapat perbandingan dari berbagai aspek yang sudah peneliti batasi yaitu:

1. Aspek Efektifitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat terhadap hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menunjukkan adanya beberapa kesamaan diantaranya terkait dengan gedung, drainase, jalan beton, tempat pembuangan limbah sama-sama ada di kedua Derah tersebut. Terkait pengelolaan persampahan, penanganan kebakaran, penyediaan air minum di lingkungan kumuh belum ada fasilitasnya. Sehingga untuk efektifitas sendiri belum mencakup semuanya karena masih ada beberapa aspek dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang belum terwujud karena tidak semua aspek yang harus dilakukan yaitu bertahap dalam membangun suatu infrastruktur sehingga diutamakan yang benar-benar masyarakat butuhkan. Dengan hal ini untuk efektifitasnya sudah berhasil namun masih ada beberapa aspek yang belum dicapai dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih.

## 2. Aspek Efisiensi

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih menunjukkan bahwa hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah terbangun infrastruktur namun belum bisa dikatakan 100% efisien. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan bantuan dari pusat yang tidak mencukupi kebutuhan untuk Kelurahan atau desa. Namun, untuk waktunya sudah ditetapkan yaitu 1 tahun dalam pembangunan. Pada saat peneliti turun lapangan untuk pengerjaannya tidak mengalami keterlambatan dari Kelurahan Tanjung cepat dari yang 1 tahun ditentukan dalam pembangunan hanya sekitar pengerjaannya 6-7 bulan sedangkan untuk Desa Air Putih juga tidak mengalami keterlambatan dari yang 1 tahun ditentukan menjadi 5-6 bulan pengerjaannya.

## 3. Aspek Kecukupan

Dari hasil penelitian ini terkait dengan aspek kecukupan menunjukkan adanya kesamaan untuk hasil Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih, terlihat dari program ini yang dibantu oleh LKM, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lurah/Desa yang telah membantu mengurangi dan memecahkan masalah di wilayah permukiman kumuh dengan hal ini untuk aspek kecukupan sudah berhasil dan sudah di rencanakan dan ditetapkan.

## 4. Aspek Pemerataan

Dari hasil penelitian ini terkait dengan aspek pemerataan yang menunjukkan kesamaan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih sudah bisa dikatakan merata, dikarenakan berjalan sesuai dengan program yaitu penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kawasan kumuh. Sehingga, dari tahun 2016-2020 penanganan wilayah kumuh di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih sudah sangat bermanfaat untuk Desa ataupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian peneliti yang sudah turun lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan di Kelurahan Tanjung tepanya pada Daerah pesisir pantai RW.14 dan Desa Air Putih di Dusun Kemang Masam sudah tertangani dan wilayah kumuh menjadi berkurang.

## 5. Aspek Responsivitas

Dari hasil penelitian ini untuk Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih menunjukkan bahwa untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini memberikan berbagai tanggapan dari masyarakat. Seperti di Kelurahan Tanjung masyarakat memberikan tanggapan yang peneliti temui untuk wawancara, masyarakat di Daerah pesisir pantai tersebut merasa terbantu karena adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini namun masyarakat juga merasa kecewa dengan ini karena menurut masyarakat walaupun sudah dibangunnya pembangunan infrastruktur di Daerah tersebut.

Kurangnya perawatan seperti pada tempat pembuangan limbah yang dibangun tapi tidak dirawat sama sekali apalagi sekarang untuk penampungan limbah tersebut sudah tersumbat dan mengakibatkan bau di Daerah tersebut apalagi di daerah tersebut kebanyakan masyarakat tidak ada toilet. Sehingga, untuk buang air besar pun masyarakat disana masih menggunakan cara yang terbilang tradisional dan memiliki julukan dimasyarakat yaitu toilet terbang maksudnya adalah masyarakat disana kalau ingin buang air besar mereka harus menggunakan plastik setelah itu masyarakat akan membuang plastik itu ke Pantai karena tidak ada cara yang lain.

Selanjutnya pada Desa Air Putih, respon masyarakat juga sama dengan Kelurahan Tanjung. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), untuk Desa Air Putih menerima bantuan program ini pada tahun 2020 dan masih terbilang baru namun untuk gedung masih dirawat akan tetapi tidak adanya aktifitas masyarakat disana setelah peneliti melihat secara langsung. Masyarakat disana berpendapat mereka merasa terbantu akan tetapi karena Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Air Putih ini mengangkat UKM dan pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan UKM, dengan hal ini tanggapan masyarakat mereka kekurangan alat untuk melakukan kegiatan seperti mengelolah buah keranji tersebut sangatlah sulit jadi di Desa Air Putih ini masyarakat kekurangan alat untuk melakukan kegiatan.

## 6. Aspek Ketepatan

Dari hasil penelitian terkait dengan aspek ketepatan yang diperoleh dari masyarakat terdapat perbedaan hasil di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih. Pada Kelurahan Tanjung aspek ketepatan menunjukkan hasil Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah bermanfaat karena program ini sudah terencana yang memberikan perubahan yang awalnya kumuh menjadi lebih tertata. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung sudah sangat tepat dalam melakukan survei untuk kawasan kumuh Karena di Daerah Pesisir Pantai RW.14 tersebut memang kumuh dan keadaannya sangat memperhatikan apalagi di zaman yang sudah modern mustahil setiap rumah tidak adanya WC sehingga Daerah tersebut harus diperhatikan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasa.

Sedangkan Desa Air Putih untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dusun Kemang Masan dan sudah sangat tepat dibangkannya bangunan tersebut di Daerah itu karena memang kumuh sehingga hasil dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini benar-benar memberikan manfaat seperti penataan kawasan sudah terlihat seperti drainase, rumah produksi, rumah galeri dan lain-lain.

Berdasarkan pemamparan yang telah peneliti jelaskan bahwa relasi para aktor terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mana sudah dijelaskan pada gambaran umum bahwa aktor-aktor yang terlibat atau stake holder yang terlibat dalam program ini adalah PT.Timah maupun Universitas Bangka Belitung. Dengan kata lain mereka ikut berpartisipasi dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), PT. Timah dalam program ini membantu dalam memberikan bantuan kepada masyarakat seperti salah satu contohnya di Desa Air Putih yang memberikan bantuan perternakan ayam kepada Desa Air Putih untuk dikelola. Dengan seperti ini hasil dari penjualan ayam tersebut dapat dikelola kembali oleh masyarakat, selanjutnya aktor-aktor lain yaitu Universitas Bangka Belitung tepatnya pada jurusan teknik sipil yang berkerjasama dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang melibatkan mahasiswa didalam program ini agar

pembangunan yang dibangun sesuai dengan aspek-aspek dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Relasi lainnya yang terjadi pada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten maupun masyarakat, dalam aktor-aktor tersebut Pemerintah Pusat Berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan atau pelaksanaan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini karena apabila kuranya partisipasi masyarakat maka Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini tidak berjalan dengan hal ini dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dari hasil penelitian peneliti dengan judul "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020" yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan dari implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut yaitu:

1. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diresmikan oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat miskin dapat terbantu, yang menunjukkan adanya perubahan baik di segi sosial ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.
2. Proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Muntok tepatnya di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih mengalami perubahan dari yang awal Daerahnya kumuh menjadi berkurang kekumuhan dikedua Daerah tersebut. Sehingga Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih cukup berhasil untuk proses pelaksanaannya yang dilihat dari beberapa tahapan seperti tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Namun, masih banyak yang harus dilihat dari beberapa aspek Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang belum terlaksana sepenuhnya.

3. Pencapaian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Muntok yang lokasinya berada di Kelurahan Tanjung dan Desa Air Putih dalam menghadapi masalah kemiskinan cukup berhasil, karena dilihat dari beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) membuat masyarakat yang berada di kawasan kumuh menjadi terbantu.
4. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yang mana peneliti menggunakan teori dari William N Dunn kebijakan publik tepatnya pada implementasi yaitu:
  - Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu adanya prasana dan sarana yang dibangun oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini sehingga memberikan manfaat baik untuk masyarakat maupun Negara.
  - Yang kedua dalam pelaksanaan, selain dapat memecahkan masalah dimasyarakat yaitu dapat membantu penanggulangan kemiskinan seperti adanya bantuan pembangunan infrastruktur untuk kawasan kumuh yang tentunya melibatkan masyarakat didalam program ini. walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan tetapi cukup berhasil dalam pelaksanaannya.
  - Yang terakhir pencapaian program ini, dari kedua Daerah yang penulis teliti bahwa pencapaiannya sudah ada dan sudah berdasarkan tujuan, namun untuk melengkapi kesempurnaan belum sepenuhnya terwujud atau dikategorikan cukup berhasil.

Temuan di lapangan peneliti mendapatkan inti dari keseluruhannya yaitu:

- a. Kelurahan Tanjung untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah sangat bagus dan sudah berjalan dengan aspek-aspek program ini walaupun belum semuanya terwujud. Untuk pemilihan Daerah yangawasannya kumuh juga sudah sangat tepat, tetapi karena

kurangnya perawatan terhadap bangunan membuat masyarakat di Daerah tersebut kecewa karena kurangnya perawatan dari Penanggungjawab.

- b. Adapun, di Desa Air Putih Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah berjalan dalam proses yang baik dan sudah berjalan berdasarkan aspek-aspek dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) walaupun belum semua dari aspek-aspek terwujud. Namun, ada kekurangannya yaitu pada alat untuk memproduksi dalam membuat berbagai olahan alatnya kurang dan juga masyarakat disana hanya sebagian yang mau ikut didalam setiap kegiatannya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang sering ikut kegiatan tersebut. Hambatan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu untuk memperomosisikan olahan buah keranjinya masih kurang karena belum dikenal orang banyak bahwa keranji tersebut adalah ciri khas dari Desa Air Putih.

Berdasarkan hal tersebut sehingga untuk masalah permukiman kumuh dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah berjalan sesuai dengan aspek-aspek dari program. Namun, karena kurangnya dana menjadi hambatan dalam membangun berbagai infrastruktur sehingga untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) setiap setahun sekali diadakan dan itupun untuk lokasinya berbeda-beda karena program ini baru adanya pembangunan pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga setiap lokasinya berbeda-beda yaitu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Tanjung dengan lokasinya pada permukiman kumuh di Daerah Pesisir Pantai RW.14 sedangkan Desa Air Putih untuk lokasinya di Dusun Kemang Masam.

## **B. Saran**

Dari hasil akhir dalam skripsi ini peneliti mengajukan berbagai saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan diharapkan untuk selalu memelihara bangunan yang sudah dibangun agar adanya perawatan.

2. Pelibatan masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangunan lebih ditingkatkan lagi, karena masyarakat adalah peran utama dalam keberhasilan dari program ini dan orang yang paling mengetahui permasalahan di Daerah mereka, jadi melibatkan masyarakat serta merespon masyarakat harus lebih diperhatikan.
3. Bagi pemerintah Daerah dikarenakan pentingnya program ini untuk menangani masalah permukiman kumuh untuk lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak Daerah-daerah yang masih dikategorikan kumuh.
4. Bagi LKM yang bertugas di Kelurahan atau Desa untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pengelolaan program sehingga apa yang diinginkan dan hasil yang diinginkan akan tercapai maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdoellah Y. Awan dan Rufiana Yudi. 2016.

Teori Dan Analisis Kebijakan Publik

Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Harison, Lisa, 2007. Metode Penelitian Politik

Jones, O Charles. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexi J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya

Rahman Bustami dan Ibrahim. 2009.

Menyusun Proposal Penelitian.

Pangkalpinang. UBB Pers

Jurnal dan Skripsi :

Cristiani, Imelda Stevani dan Djumiarti Titik.

2020. Impelementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur.

Jurnal: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro

Endah Fitria Maulana, dkk. 2019.

Implementasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi. Jurnal: Universitas sebelas maret Surakarta.

Hajaroh, Mami. 2018. Pohon Teori

Implementasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). Jurnal: Universitas Negeri Yogyakarta.

Kholqi, Ahsanul. 2020. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). Jurnal: Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

Mulyadi, dkk. 2015. Implementasi Program. Jurnal: Lembaga Pengembangan Universitas Negeri Jakarta).

Mulyadi Andi dan Ramdani Ari. 2021.

Impelementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi. Jurnal: Ilmiah Ilmu Adminstrasi

Sari, Diah Indri. 2019. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Jurnal: Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak

Sundari Siti, dkk. 2020. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Jurnal: Universitas Galuh.

Suciati, Annisa. 2017. Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syahrpiani, Yunita. Dkk. 2020. Implementasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabuaen Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Ulya, Afwah. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota  
Semarang.

- Widiyanti, Imas. 2018. Implementasi Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di Kricak Yogyakarta.
- Yulia, Ranny. 2015. Implementasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro. Jakarta.
- Zuhrya, Almas. 2017. Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi.
- Zulyanti, Dewi. 2017. Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negei Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

Dokumen :

- Dokumen Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (kotaku.pu.go.id)
- Keputusan Bupati Bangka Barat nomor:  
118.45/391/1.06.01/2014
- Keputusan Bupati Bangka Barat nomor:  
188.45/295/4.3.1/2017
- Keputusan Bupati Bangka Barat nomor:  
188.45/595.A/4.3.1.1/2018
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2003.

Artikel/Akses internet :

- <https://bangkabaratkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/06/21/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-bangka-barat-2012-2019.html> (diakses pada tanggal 04 februari 2021 pukul 11.00 wib)
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/> (diakses pada tanggal 02 mei 2021 pukul 11.35 wib)
- <http://kotaku.pu.go.id/age/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> (diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 08.42 wib)
- <http://kotaku.pu.go.id/view/7574/antara-pembangunan-infrastruktur-mbr-dan-penanganan-kumuh> (diakses pada tanggal 11 januari 2022 pukul 22.37 wib)



#### Korespondensi

Email<sup>1</sup> : hafidrohman24@gmail.com

Email<sup>2</sup> : farizkibudi@gmail.com

Email<sup>3</sup> : aanmunandar10@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

## **ANALISIS SIG BERDASARKAN DATA GEOLOGI DAN GEOSPASIAL SEBAGAI INOVASI MITIGASI TANAH LONGSOR (Studi Kasus Daerah Wukirsari Imogiri)**

**Hafid Rizki Nur Rohman<sup>1\*</sup>, Farizki Budi Pangestu<sup>2\*</sup>,  
Aan Munandar<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Jl.  
Padjajaran, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55283

Disetujui: 25 April 2022

#### **Abstract**

*Indonesia is a country with a high level of landslides, one of which is the Imogiri area of Bantul, especially Wukirsari Village. The Wukirsari area is an area that has a morphology in the form of rolling hills and is traversed by the Opak Fault, causing the area to be prone to landslides that can cause physical losses and casualties. This condition is the background for conducting this research by observing the geological conditions, land use, rainfall, and slope in the area to carry out an innovation analysis based on a geographic information system that produces a map of the level of vulnerability to landslides in the research area. The research area has a hilly morphology that is steep to steep with constituent rocks in the form of pyroclastic rocks incorporated in the Semilir Formation and volcanic breccias incorporated in the Nglanggeran Formation and composed of latosol soil textured from clay to sand. The research area also found geological structures that developed in the form of faults and also rainfall conditions of more than 2000mm/year with land use dominated by forests and plantations. This research produces a map of low, medium, and high landslide susceptibility zones which are dominated by moderate vulnerability. The results of the study can be used as the main information in efforts to mitigate landslides in the Wukirsari, Imogiri, Bantul areas.*

**Keywords:** Land Movement, Imogiri District, GIS, Landslide Risk Map, Weighted Overlay

#### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara dengan tingkat bencana tanah longsor yang tinggi, salah satunya yaitu Daerah Imogiri Bantul terutama Desa Wukirsari. Daerah Wukirsari merupakan daerah yang memiliki morfologi berupa perbukitan yang curah dan dilalui oleh jalur Sesar Opak sehingga mengakibatkan daerah tersebut rawan bencana tanah longsor yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun korban jiwa. Kondisi tersebut menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini dengan melakukan pengamatan kondisi geologi, tataguna lahan, curah hujan, dan kelerengan pada daerah tersebut untuk dilakukan analisis inovasi berbasis sistem informasi geografis yang menghasilkan peta tingkat kerentanan bencana tanah longsor pada daerah penelitian. Daerah penelitian memiliki morfologi perbukitan yang curam hingga terjal dengan batuan penyusun berupa batuan piroklastik yang tergabung dalam Formasi Semilir dan breksi vulkanik yang tergabung dalam Formasi Nglanggeran serta disusun oleh tanah latosol bertekstur lempung hingga pasir. Daerah penelitian juga dijumpai struktur geologi yang berkembang berupa patahan dan juga kondisi curah

hujan lebih dari 2000mm/th dengan tataguna lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan. Penelitian ini menghasilkan peta zona kerentanan tanah longsor rendah, sedang, dan tinggi yang didominasi oleh kerentanan yang sedang. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai informasi utama dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor pada daerah Wukirsari, Imogiri, Bantul.

**Kata Kunci:** Gerakan Tanah, Kecamatan Imogiri, SIG, Tumpang tindih berbobot, Zona rawan longsor

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat resiko kebencanaan geologi yang tinggi (Tanjung et al., 2020). Sepanjang tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) mencatat ada 1.019 bencana alam yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan 1.533.626 orang terdampak bencana. Beberapa bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Salahsatu bencana geologi yang sering terjadi pada daerah lereng di Indonesia yaitu tanah longsor.

Tanah longsor merupakan bencana geologi berupa gerakan material tanah dan batuan di sepanjang lereng atau diluar lereng yang disebabkan oleh faktor gravitasi sebagai faktor utama (Suwaryo et al.,2017). Longsor dapat diakibatkan oleh beberapa kejadian lain yang menjadi faktor pemicu secara fisis yaitu jenis tanah dan batuan batuan, struktur geologi, kemiringan lereng, tataguna lahan, dan kondisi curah hujan.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor tinggi yaitu daerah Wukirsari, Imogiri, Bantul. Daerah Wukirsari didominasi oleh morfologi berupa perbukitan dengan kelerengan curam hingga terjal dan dilalui oleh banyak struktur patahan. Kondisi geologi pada daerah Wukirsari didominasi oleh breksi vulkanik yang merupakan bagian dari Formasi Nglanggeran dan batuan piroklastik dari Formasi Semilir. Berdasarkan penggunaan lahan dan kemiringan lereng Daerah Wukirsari, sebagian masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan yang rawan mengalami kejadian longsor sehingga diperlukan upaya mitigasi tanah longsor pada daerah tersebut sehingga

tidak menimbulkan korban jiwa maupun material.

Parameter pengaruh berupa jenis batuan dan tanah, struktur geologi, morfologi, penggunaan lahan, dan kondisi curah hujan daerah tersebut sangat penting dalam upaya mitigasi longsor. Penelitian ini dilakukan untuk analisis tingkat kerentanan bencana tanah longsor daerah Wukirsari dengan proses weighted overlay berdasarkan parameter tersebut sehingga dapat menghasilkan peta zonasi tingkat kerentanan bencana tanah longsor pada daerah penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA

Daerah Wukisari, Imogiri, Bantul secara stratigrafi tersusun oleh Formasi Semilir dan Nglanggeran. Formasi Semilir terdiri dari satuan breksi tuf pumisan, batu pasir tufan, tuf pumis dasitan. Sedangkan Formasi Nglanggeran tersusun atas batuan vulkanik berupa breksi vulkanik dengan fragmen andesit dan basalt. Daerah penelitian merupakan daerah yang dilalui oleh zona Patahan Opak dengan morfologi berupa perbukitan struktural dan juga dijumpai morfologi fluvial berupa Sungai Opak.

Tanah longsor merupakan kejadian geologi berupa pergerakan massa material yang tergelincir kebawah terhadap massa lainnya yang disebabkan oleh menurunnya kekuatan gaya lekat antar lapisan tanah menahan perubahan massa dalam suatu struktur tanah (Sudibyo et al., 2015). Material longsor bergerak searah dengan kemiringan lereng menuju ke daerah yang lebih rendah searah dengan arah lereng dan keluar lereng yang terjadi pada area lokal dan pergerakan material yang relatif cepat.

Tanah longsor dipengaruhi oleh material longsor yang mengalami pengurangan parameter kuat geser tanah yang disebabkan oleh bertambahnya kandungan kadar air tanah dan menurunnya daya ikat antar butiran material tanah (Apriyono, 2009). Proses terjadinya tanah longsor disebabkan oleh infiltrasi air yang menambah bobot tanah, yang kemudian apabila air tersebut menembus hingga bidang gelincir mengakibatkan tanah menjadi licin sehingga tanah pada bagian atas bidang gelincir akan kehilangan daya dukung tanah mengikuti arah dan keluar dari lereng (Sutasoma et al, 2017).

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang terdiri dari komponen perangkat keras, lunak, dan data geografis untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data informasi berbasis geografis (Adil, 2017). Dalam bidang mitigasi bencana tanah longsor, sistem informasi geografis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peta kerentanan bencana tanah longsor dengan melakukan analisis *weighted overlay* parameter-parameter yang mempengaruhi kejadian bencana tanah longsor. *Weighted overlay* atau tumpang tindih berbobot merupakan analisis spasial berupa teknik *overlay* beberapa peta yang berhubungan dengan faktor pengaruh terhadap nilai kerentanan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan multikriteria dalam suatu permasalahan (Adininggar et al., 2016).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada daerah Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode kuantitatif dengan analisis tumpang tindih berbobot (*weighted overlay*) faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian bencana tanah longsor. Hasil yang diperoleh berupa peta zonasi kerentanan bencana tanah longsor dan penampang bawah permukaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor pada daerah Wukirsari, Imogiri.

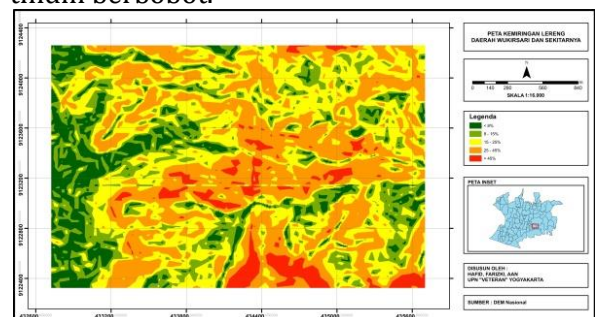
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu akuisisi atau pengambilan data primer dan sekunder, pengolahan, analisis, dan interpretasi. Tahap akuisisi merupakan tahapan dilakukannya pengambilan data primer di lapangan berupa persebaran batuan, struktur geologi, jenis tanah, dan tipe tanah. Pengumpulan data sekunder berupa data curah hujan (BMKG), kemiringan lereng (DEM Nas), dan tataguna lahan (Citra satelit Google Earth).

Pengolahan data parameter kejadian bencana tanah longsor dilakukan dengan menggunakan software ArcGis 10.6 berupa perhitungan kemiringan lereng, digitasi dan evaluasi parameter pengaruh kejadian tanah longsor. Inovasi pada penelitian ini yaitu menggabungkan atau memodifikasi parameter yang sudah ada sebelumnya dalam penyusunan

peta kerentanan bencana tanah longsor. Analisis *weighted overlay* berdasarkan klasifikasi modifikasi Puslitanak 2004 dan BNPB tahun 2013 untuk menghasilkan zonasi tingkat kerentanan bencana tanah longsor pada daerah penelitian. Analisis dan interpretasi dilakukan berdasarkan hasil zonasi tingkat kerentanan bencana tanah longsor rendah, sedang, dan tinggi pada daerah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zonasi tingkat kerentanan tanah longsor didasarkan pada parameter-parameter pengaruh kejadian bencana tanah longsor yang kemudian dilakukan sistem tumpang tindih berbobot.



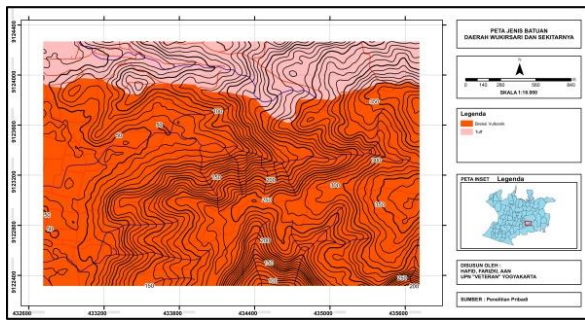
Gambar 1. Peta Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap kejadian tanah longsor, semakin tinggi persentase kemiringan lereng akan menyebabkan gaya ke arah bawah semakin besar. Data kemiringan lereng diperoleh dari data *Digital Elevation Model Nasional*. Pada daerah penelitian didominasi oleh kemiringan curam yaitu 25 - 45% dengan luas area mencapai 1,89 km<sup>2</sup>. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter kemiringan lereng pada daerah penelitian :

Tabel 1. Pengkelasan klasifikasi kemiringan lereng menurut Puslitanak 2004

Parameter	Kelas	Skor	Luas(km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Kemiringan Lereng	<8%	1	0,69	20
	8-15%	2	1,07	
	15-25%	3	1,81	
	25-45%	4	1,89	
	>45%	5	0,30	

Sumber data : DEM Nas



Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng

Jenis batuan yang terdapat pada daerah penelitian sangat berpengaruh terhadap kerentanan pergerakan tanah, semakin tua dan lapuk batuan yang berada di zona kemiringan lereng akan sangat rentan terhadap beban dan bidang gelincir yang ada. Diketahui pada daerah penelitian ini disusun oleh batuan breksi vulkanik Formasi Ngalanggeran dan tuf Formasi Semilir.



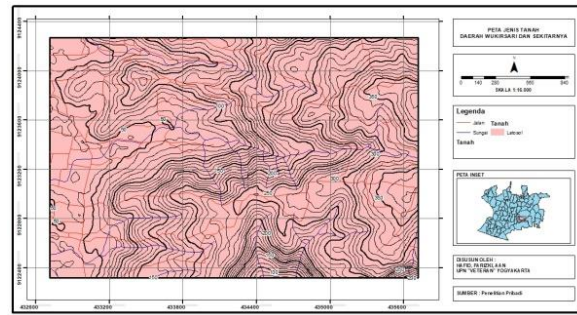
Gambar 3. Tuff Formasi Semilir (kiri), Breksi Vulkanik Formasi Ngalanggeran (kanan)

Berdasarkan material penyusunnya, maka jenis batuan penyusun litologi ini dipengaruhi oleh aktifitas gunungapi selama pengendapannya dengan gerakan massa yang banyak dijumpai dengan intensitas beragam mulai dari intensitas kecil hingga intensitas besar. Daerah penelitian didominasi oleh breksi vulkanik Formasi Ngalanggeran dengan luas sebesar 4,65 km<sup>2</sup>. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter jenis batuan pada daerah penelitian :

Tabel 2 : Pengkelasan klasifikasi jenis batuan menurut Puslitanak 2004

Parameter	Kelas	Skor	Luas (km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Jenis Batuan	Breksi Vulkanik	3	4,66	20
	Tuff	5	1,2	

Sumber data : Penelitian pribadi



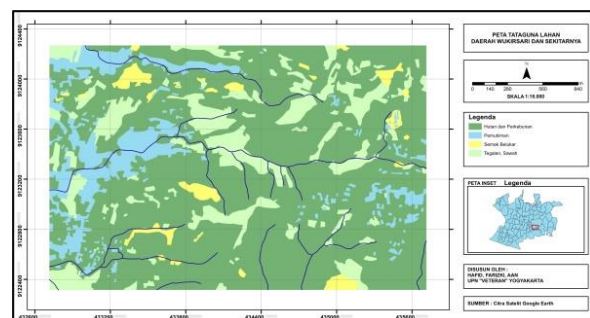
Gambar 4. Peta Jenis Tanah

Pemetaan jenis tanah dapat mengetahui zona zona lapukan yang berasal dari batuan asalnya. Sehingga dapat dipetakan daerah daerah yang memiliki kerentanan dan kerapatan massa tanah yang dapat berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. Pada data sampel lapangan yang telah diambil, didapatkan jenis tanah latosol yang menjadi penyusun lapisan paling atas permukaan daerah penelitian. Pada daerah penelitian didapatkan Luas zona persebaran tanah Latosol mencapai 5,85 km<sup>2</sup>. Tanah latosol merupakan tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dari batuan vulkanik. Tanah latosol pada daerah penelitian dicirikan tekstur lempung dengan sifat yang gembur dan berwarna coklat kemerahan. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter jenis tanah pada daerah penelitian :

Tabel 3 : Pengkelasan klasifikasi jenis tanah menurut Puslitanak 2004

Parameter	Kelas	Skor	Luas (km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Jenis Tanah	Latosol	3	5,86	10

Sumber data : Penelitian pribadi



Gambar 5. Peta Tataguna Lahan

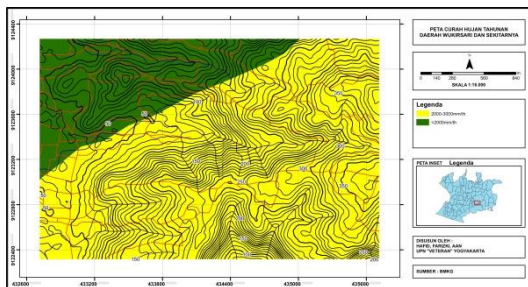
Penggunaan lahan berpengaruh terhadap tingkat kerentanan bencana tanah longsor ditinjau dari resapan air ke dalam tanah, ikatan partikel antar butir, dan pembebanan yang berbeda berdasarkan tataguna lahan di atasnya. Pengolahan peta tataguna lahan diperoleh dari Citra Satelit Google Earth yang kemudian

dilakukan digitasi secara manual dengan software Arcgis. Pada daerah penelitian didominasi dengan penggunaan lahan berupa hutan dan perkebunan yang mencapai luas 4,17 km<sup>2</sup>. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter tataguna lahan pada daerah penelitian.

**Tabel 4.** Pengkelasan klasifikasi tataguna lahan menurut BNPB 2013

Parameter	Kelas	Skor	Luas (km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Tataguna Lahan	Kota/ Pemukiman	2	0,62	20
	Hutan dan Perkebunan	3	4,18	
	Semak Belukar	4	0,18	
	Tegalan, Sawah	5	0,88	

Sumber data : Citra Satelit Google Earth



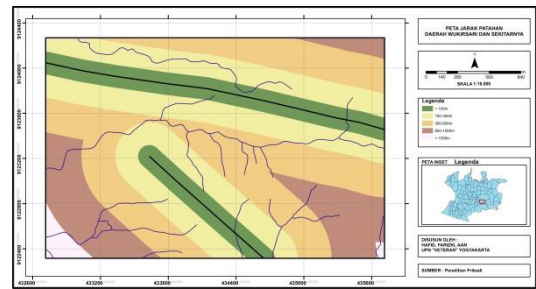
**Gambar 6.** Peta Curah Hujan

Curah hujan sangat mempengaruhi kualitas tanah, dan batuan di daerah penelitian karena hujan sendiri merupakan salah satu faktor pengaruh dari infiltrasi air ke dalam permukaan yang meningkatkan derajat kejenuhan material di atas bidang gelincir tanah longsor. Daerah penelitian didominasi dengan curah hujan yang sedang yaitu 2000-3000 mm/th ditandai dengan warna kuning pada peta, dan curah hujan rendah yaitu <2000 mm/th ditandai dengan warna hijau. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter curah hujan pada daerah penelitian.

**Tabel 5 :** Pengkelasan klasifikasi curah hujan menurut Puslitanak 2004

Parameter	Kelas (mm/th)	Skor	Luas (km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Curah Hujan	<2000	2	1,4	25
	2000 - 3000	3	4,45	

Sumber data : BMKG



**Gambar 7.** Peta Jarak Patahan

Struktur geologi berupa patahan merupakan salah satu kontrol terhadap adanya gempa bumi dan kejadian seismisitas, apabila patahan tersebut aktif, maka daerah di sekitarnya akan mengalami guncangan yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, sehingga jarak area terhadap struktur patahan dapat berpengaruh terhadap kejadian tanah longsor.



**Gambar 8.** Struktur Patahan

Berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan, dijumpai 2 struktur patahan dengan arah relatif yaitu berorientasi barat - timur, dan baratlaut – tenggara. Berikut inventarisasi dan pengkelasan parameter jarak patahan pada daerah penelitian.

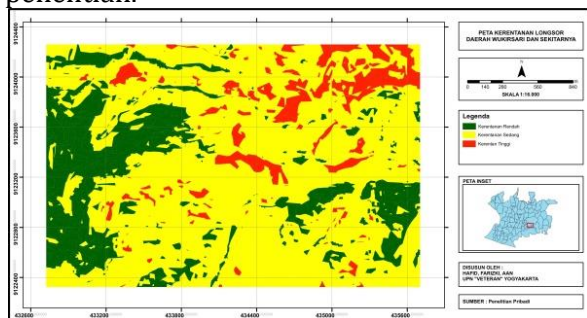
**Tabel 6 :** Pengkelasan klasifikasi jarak patahan menurut BNPB 2013

Parameter	Kelas (m)	Skor	Luas (km <sup>2</sup> )	Bobot (%)
Jarak Patahan	> 1000	1	0,1	5
	600 - 1000	2	0,94	
	300 - 600	3	2,05	
	100 - 300	4	1,86	
	<100	5	0,9	

Sumber data : Penelitian pribadi

Pembagian zonasi dilakukan dengan perhitungan data pengkelasan (*skoring*) dan pembobotan dari masing-masing parameter yang dilakukan berdasarkan modifikasi sistem skoring dan pembobotan kejadian bencana tanah longsor menurut Puslitanak dan BMKG yaitu kemiringan lereng, curah hujan, jenis

tanah, jenis batuan, tataguna lahan, dan jarak patahan. Tumpang tindih berbobot dilakukan dengan menggunakan Software Arcgis dengan rumusan yaitu  $((20\% \times \text{kemiringan lereng}) + (25\% \times \text{curah hujan}) + (10\% \times \text{jenis tanah}) + (20\% \times \text{jenis batuan}) + (20\% \times \text{tataguna lahan}) + (5\% \times \text{jarak patahan}))$ . Dengan perumusan tersebut diperoleh tiga zonasi tingkat kerentanan tanah longsor yaitu zona rendah, sedang, dan tinggi. Berikut hasil zonasi tingkat kerentanan bencana tanah longsor pada daerah penelitian.



Gambar 9. Peta Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Hasil dari analisis weighted overlay menunjukkan pada daerah penelitian didominasi oleh tingkat kerentanan sedang yaitu dengan luas area mencapai 43,98 km<sup>2</sup>, dan dijumpai tingkat kerentanan sedang dengan luas area sebesar 1,3 km<sup>2</sup> yang dijumpai pada daerah datar maupun pada daerah dengan vegetasi berupa hutan perkebunan, dan tingkat kerentanan tinggi yang menunjukkan tingginya bahaya bencana tanah longsor memiliki luas 0,5 km<sup>2</sup> yang berada pada daerah curam hingga terjal, sedikit dijumpai vegetasi, dan berada pada batuan berlapis, serta berada di daerah bidang patahan. Peta kerentanan bencana tanah longsor tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan mitigasi bencana tanah longsor dengan meninjau urgensi dari masing-masing daerah pada peta tersebut.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Daerah penelitian yang berada di Wukrisari, Imogiri terdapat batuan berupa tuff dari Formasi Semilir dan breksi Vulkanik dari Formasi Nglangeran serta terdiri dari tanah latosol yang merupakan material hasil pelapukan batuan vulkanik. Struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian berupa patahan dengan arah relatif yaitu berorientasi barat - timur, dan barat laut - tenggara. Kondisi morfologi berupa perbukitan dengan dominasi tingkat kemiringan curam dan didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan dan perkebunan. Hasil dari analisis

weighed overlay menunjukkan pada daerah penelitian didominasi oleh tingkat kerentanan bencana tanah longsor yang sedang, sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi bencana tanah longsor pada daerah tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Masyarakat Desa Wukirsari dan Kampus UPN "Veteran" Yogyakarta serta seluruh pihak yang mendukung dan membantu dalam penelitian ini.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- (Puslittanak) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. (2004). Laporan Akhir Pengkajian Potensi Bencana Kekeringan, Banjir dan Longsor di Kawasan Satuan Wilayah Sungai Citarum-Ciliwung, Jawa Barat Bagian Barat Berbasis Sistem Informasi Geografi. Bogor.
- Adil, A., & Kom, S. (2017). Sistem Informasi Geografis. Penerbit Andi.
- Adininggar, F. W., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2016). Pembuatan peta potensi lahan berdasarkan kondisi fisik lahan menggunakan metode weighted overlay. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(2), 136-146.
- Apriyono, A. (2009). Analisis penyebab tanah longsor di Kalitlaga Banjarnegara. *Dinamika Rekayasa*, 5(1), 14-18.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2013. Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Tingkat Kabupaten/Kota
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (KataData). (2022). Ada 1.019 Bencana Alam di Indonesia hingga 21 Maret 2022. diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/22/ada-1019-bencana-alam-di-indonesia-hingga-21-maret-2022> pada tanggal 10 April 2022
- Sudiby, N. H., & Ridho, M. (2015). Pendeteksi Tanah Longsor Menggunakan Sensor Cahaya. *Jurnal Teknologi Informasi Magister*, 1(02), 218-227.
- Sutasoma, M., Susilo, A., & Suryo, E. A. (2017). Penyelidikan Zona Longsor dengan Metode Resistivitas dan Analisis Stabilitas Lereng untuk Mitigasi Bencana Tanah

- Longsor. Indonesian Journal of Applied Physics, 7(1), 36-45.
- Suwaryo, P. A. W., & Yuwono, P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana alam tanah longsor. URECOL, 305-314.
- Tanjung, R., Mulyadi, D., Arifudin, O., & Rusmana, F. D. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana



**Korespondensi**  
Email : [hammidah22q@gmail.com](mailto:hammidah22q@gmail.com)



Inovbook Publications  
Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

## **STRATEGI MEMPERTAHANKAN PEREKONOMIAN KELUARGA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DESA KURAU BARAT, KECAMATAN KOBA**

**Hammidah Qur'anis<sup>1\*</sup>, Putra Pratama Saputra<sup>2\*</sup>,  
Fitri Ramdhani Harahap<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,  
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 April 2022

### **Abstract**

*This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The data sources of this research are primary data in the form of informants and secondary data in the form of documents and literature. The data analysis used is interactive analysis with three stages, namely data reduction, data modeling and drawing conclusions. The results showed that high trust between individuals can form strong social capital so that they are able to form social networks within a group. The social capital owned by the village of Kurau Barat with existing MSMEs is very much felt so that it provides effective results for the development of the businesses they manage. The role of social capital in each individual affects the capacity and quality within the village. Effective use of social capital can provide impetus for business development. Internal development of the "Getas and Ampiang" business group in increasing potential by using initial capital with own savings, innovating for their production, expanding marketing networks, and completing business facilities and infrastructure. In addition, facilitation from external parties, namely the Cooperatives Service and the Industry and Trade Office, has provided MSMEs access to sources of capital, conducted coaching and training, product promotion activities, expanded product marketing, and provided facilities and infrastructure. However, some entrepreneurs are constrained by rising prices of raw materials, limited raw materials, having problems with capital, lack of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, MSMEs, Strategy, Economy, Family

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa informan dan data sekunder berupa dokumen dan literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi antar individu dapat membentuk modal sosial yang kuat sehingga mampu membentuk jaringan sosial di dalam suatu kelompok. Modal sosial yang dimiliki oleh desa Kurau Barat dengan UMKM yang ada sangat dirasakan keberadaannya sehingga memberikan hasil yang efektif terhadap pengembangan usaha yang mereka kelola, Peran modal sosial di dalam masing-masing individu mempengaruhi kapasitas dan kualitas di dalam desa tersebut. Modal sosial yang didayagunakan secara efektif dapat

memberikan dorongan untuk pengembangan usaha. Pengembangan secara internal dari kelompok usaha "Getas dan Ampiang" dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, fasilitasi dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan bahan baku, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, UMKM, Strategi, Perekonomian, Keluarga

## I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020:1148). *The World Trade Organisation* (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020:85).

Masyarakat Bangka Belitung salah satu yang mengalami hal yang sama semenjak adanya Covid-19 ini pemerintah juga turut bergerak cepat untuk meredakan kepanikan yang ada dimasyarakat dengan cara menghimbau masyarakat melakukan pola hidup bersih menggunakan masker dan membawa *hand sanitizer*, diketahui bahwa Covid-19 mempengaruhi perekonomian yang ada di masyarakat Bangka Belitung. Bahwa sektor yang terkena dampak selama pandemi Covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya, tetapi sektor ekonomi yang paling terpengaruh

oleh Covid-19 adalah sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020:1152).

Maka dari itu tentunya masyarakat terutama keluarga yang ada di kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Kurau Barat, bahwa Kurau adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa Kurau dibagi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kurau Barat dan Kurau Timur yang dipisahkan oleh jembatan kurau. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani sawit. Desa Kurau Barat dan Timur berada sekitar 21 Km dari Kota Pangkalpinang, terletak di pesisir pantai yang menghadap ke Laut China Selatan. Masyarakat Desa Kurau Barat dan Timur umumnya adalah keturunan Bugis yang berprofesi sebagai Nelayan. Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah terletak sekitar 20 km dari Kampus Universitas Bangka Belitung di Balunijuk. Desa ini memiliki jumlah penduduk 2.777 jiwa. Desa Kurau Barat memiliki potensi pengembangan produk olahan ikan. Letaknya yang strategis di pesisir, memudahkan akses mendapatkan bahan baku. Namun, perikanan tangkap yang bersifat musiman, menjadi kendala bagi pengembangan usaha ini.

Keberadaan UMKM di desa Kurau Barat akan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Potensi yang dimiliki adalah produk olahan ikan, letak yang strategis dalam pengambilan sumber daya membuat masyarakat sekitar berinisiatif dalam mengolahnya melalui produk seperti Getas dan Ampiang. Sebagaimana besar jenis usaha yang di desa Kurau Barat berfokus pada sektor industri olahan makanan dari ikan.

Hal ini dikarenakan desa Kurau Barat yang dekat dengan lautan sehingga ini yang membuat pemilik Usaha Mikro lebih memilih mengelolah hasil laut dengan berbagai macam olahan makanan yang berupa kemplang, ampiang, getas dan lain-lainnya. Makanan ringan berupa getas yang ada di desa Kurau Barat ini merupakan makanan renyah yang tidak hanya memanjakan lidah tetapi mengandung protein yang tinggi. Seharusnya produk-produk Usaha Mikro desa Kurau Barat ini sudah memiliki potensi yang memang harus di kenalkan ke luar daerah. salah satu di antaranya adalah UMKM yang menghasilkan

barang konsumsi dan bisnis kecil atau jasa yang selalu dekat dengan masyarakat.

Hal ini yang menjadi sangat berpotensi untuk mempertahankan perekonomian keluarga akan tetapi adanya Covid-19 mempengaruhi perekonomian baik dari segi aktifitas seperti istri membantu pekerjaan suami karena situasi. Aktivitas produksi UMKM di Kurau Barat, dikerjakan secara rumahan atau home industry. Dalam proses kegiatan usahanya, mereka melibatkan orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga, kerabat, sanak famili, ataupun orang lain yang memang membutuhkan pekerjaan ikut membantu atau dipekerjakan dalam produksi getas dan ampiang tersebut. Adanya kesamaan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM antara satu dengan yang lainnya di Desa Kurau Barat, menimbulkan persaingan yang cukup kompetitif dalam penjuala getas dan ampiang. Hal ini mengakibatkan antara pelaku UMKM satu dengan yang lain harus mempunyai pasar sendiri-sendiri jika mereka ingin mendapatkan hasil penjualan yang lebih. Salah satu bentuk usaha yang menggunakan peran jaringan ini adalah usaha Getas dan Ampiang, setiap rumah sebagian sudah mempunyai toko jualan sendiri-sendiri sehingga melihat situasi Covid-19 yang menjadi kekhawatiran masyarakat setempat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, agar diperoleh data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai strategi mempertahankan perekonomian keluarga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid 19 melalui pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha keluarga UMKM di Desa Kurau Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang telah didapatkan untuk diinterpretasikan melalui sebuah deskripsi yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data untuk mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, dengan kata lain kualitatif

(*qualitative approach*) merupakan suatu cara atau mekanisme kerja penelitian yang deskriptif dan menghimpun data hingga menafsirkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015:52).

Analisis data versi Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2016: 404-412) bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Pada saat wawancara, peneliti membuat suatu catatan. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik). Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penghambat Serta Pendukung dalam Mempertahankan Perekonomian Keluarga UMKM di Tengah Pandemi Covid 19

Proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 tentu akan berkaitan dengan hambatan dan dukungan pada proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di desa Kurau Barat menjadi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut:

##### 1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan salah satu proses yang bisa menghambat dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19. Oleh karena itu tentu saja membuat proses dalam pemasaran UMKM menjadi terkendala atau tidak berjalan dengan optimal.

Faktor penghambat dalam proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 terjadinya beberapa hal tak terduga pada proses pemasaran dengan adanya wabah virus yang menghambat kegiatan produksi serta kurangnya pembeli bahkan omset menurun. Hal ini tentu saja akan menjadi penghambat dalam proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM.

Menjelaskan bahwa adanya wabah virus ini membuat semua aktifitas produksi terhambat yang mana saat ini pembeli yang biasanya ke toko sekarang sudah berkurang sehingga mempengaruhi omset. Harapannya umkm yang ada di tengah pandemi Covid-19 ini bisa lebih kreatif dan tetap mempertahankan usahanya untuk kedepannya bisa lebih maju. Kesimpulannya adanya pandemi Covid-19 ini segala aktifitas pekerjaan di usaha keluarga ini mengalami penurunan perekonomian.

Bahwa modal pada usaha keluarga yaitu UMKM adanya hambatan di modal usaha dipandemi ini juga walaupun bahan baku seperti ikan, minyak, sagu dan lainnya memadai. Hanya saja dikarenakan adanya Covid-19 yang mengakibatkan tidak boleh berkumpul sehingga ada pemutaran modal mengakibatkan produksi dan pembeli berkurang.

Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya pembeli dan produksi sangat

berpengaruh hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan penurunan pendapatan terhadap usaha keluarga yaitu UMKM. Mengingat bahwa pandemi cukup berpengaruh terhadap masyarakat yang mana mereka hanya melakukan kegiatan dirumah saja, hal itu mengakibatkan jumlah permintaan getas berkurang. Bahkan berkurangnya pembeli ke toko juga merupakan hal yang membuat turunnya jumlah pendapatan. Tempat UMKM yang strategis karena berada di pinggir jalan raya yang mudah dijangkau oleh pembeli.

##### 2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang sifatnya dapat mendorong dalam proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM guna memberikan dan membantu agar potensi yang ada di desa Kurau Barat dimanfaatkan supaya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dapat mempermudah proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM jika adanya faktor-faktor yang bisa membantu dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM dapat berkembang dan bersinergi.

Masyarakat Desa Kurau Barat salah satunya memiliki pekerjaan sebagai nelayan hal ini yang menjadi peluang bagi UMKM yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sehingga nelayan yang ada di Desa Kurau Barat terbantu adanya UMKM ini dan memiliki peluang usaha terutama melibatkan ibu-ibu Desa Kurau Barat. Kesimpulannya Desa Kurau Barat memiliki potensi dengan sumber daya alam yang mendukung untuk dikembangkan menjadi sentra UMKM.

Adanya dukungan dari keluarga memiliki peran dalam dalam membantu usaha keluarganya seperti saudara dibutuhkan karena bisa membantu dalam mengembangkan usaha UMKM yang dimiliki keluarganya, dukungan keluarga untuk saling mendukung bisa menjadi hal yang menunjang dalam mempertahankan perekonomian bahkan saling membantu antar UMKM, dalam usaha keluarga dibutuhkan dalam mengoptimalkan proses pengembangan usaha yang ada di keluarga terutama UMKM di desa Kurau Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses mempertahankan perekonomian keluarga di tengah pandemi Covid-19 yang mana mempunyai jaringan yang dapat mendorong pelaku UMKM dalam mensukseskan proses pengelolaannya yang didukung oleh pemerintah.

## **B. Strategi Dalam Mempertahankan Perekonomian Keluarga Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Tengah Pandemi Covid-19 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba**

Ada berbagai usaha atau upaya dalam perencanaan untuk mempertahankan perekonomian keluarga yaitu UMKM yang mereka miliki dalam proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 ini bisa mengoptimalkan usahanya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan memperkerjakan masyarakat sekitar yang mana UMKM saat situasi seperti ini bisa memperluas pasar dengan cara pemasaran online dan menerima orderan secara online. Dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM upaya dan langkah-langkah yang diambil pada setiap prosesnya harus lebih direncanakan dengan baik.

Mempertahankan perekonomian keluarga UMKM ditengah pandemi Covid 19 ini memerlukan perencanaan yang tepat dalam upaya yang akan dikerjakan, supaya masyarakat sekitar tetap bisa merasakan dampak adanya UMKM walaupun situasi pandemi. Keluarga UMKM tetap bisa mempertahankan perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Strategi yang direncanakan oleh tiap pelaku usaha semuanya hampir sama seperti pemasaran online dan kerjasama antar UMKM. Adapun strategi yang akan diterapkan dalam upaya mempertahankan perekonomian keluarga UMKM ditengah pandemi Covid 19 agar tetap dapat memasarkan produknya secara online dan kerja sama antar UMKM.

Sudah ada upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 ini dengan upaya tetap produksi walaupun yang membeli kurang akan tetapi produksi sesuai dengan pesanan yang diminta oleh konsumen dengan itu para pelaku usaha juga berupaya untuk meningkatkan

pelayanan seperti ramah terhadap pembeli bahkan dikasih bonus saat membeli produk dan untuk mempertahankan usaha keluarga tentu juga harus kreatif dan inovatif tidak terlepas dengan cara manajemen usaha dengan sesuai agar tetap berkelanjutan.

Pada zaman sekarang media sosial online terbilang sangat efektif digunakan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pemasaran dan promosi secara online. Melalui media online juga setiap pelaku usaha bisa dengan mudah mengupdate tentang produk yang dijualnya ke setiap daerah. Hal ini juga dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin membeli produk UMKM yaitu getas.

Mempertahankan kualitas produk yaitu dengan kemampuan untuk tetap menjaga cita rasa dalam sebuah produk dari suatu produk tentu berpengaruh terhadap konsumen yang ingin membeli produk yang kita produksi. Hal ini menunjukkan bahwa dari beberapa cara yang telah direncanakan oleh pelaku usaha untuk tetap bisa mempertahankan kualitas produknya.

Kerjasama antar UMKM dalam hal ini untuk kerjasamanya itu lebih ke arah produk dan bahan baku untuk produksi. Sehingga UMKM yang ada di desa Kurau barat walaupun di tengah pandemi seperti ini tetap menjalankan usahanya dikarenakan juga ada kerjasama yang saling menguntungkan untuk UMKM. Selain itu strategi ini telah berlangsung secara tepat serta sudah diterapkan pada usaha yang ada di desa Kurau Barat yaitu UMKM hal ini menjadi salah satu strategi dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 di desa Kurau Barat.

## **C. Analisis Teori Modal Sosial Dari Robert Putnam Dalam Strategi Mempertahankan Perekonomian Keluarga UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba**

Berdasarkan dalam hasil penelitian ini bahwa ada strategi mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 terdapat beberapa faktor dalam proses mempertahankan perekonomiannya yang terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Adanya beberapa faktor yang akan berpengaruh dalam proses mempertahankan perekonomian

keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 ini terdapat strategi atau upaya yang memang telah dipersiapkan agar melancarkan proses dalam mempertahankan perekonomian keluarga melalui UMKM.

Hasil penelitian ini menggunakan Teori modal sosial dari Robert Putnam dalam penelitiannya ini mengenai strategi mempertahankan perekonomian keluarga di tengah pandemi Covid 19 yang mana peran modal sosial begitu diperlukan untuk dapat mempermudah proses dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi supaya bisa mengoptimalkan apa tujuan yang akan dicapai. Teori yang digunakan ini supaya bisa melihat proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 ini menggunakan modal sosial dari Robert Putnam.

Dalam hasil penelitian mengenai strategi mempertahankan perekonomian UMKM keluarga di tengah pandemi tidak terlepasnya dari peran modal sosial maka dari itu untuk proses untuk mempertahankan perekonomian keluarganya dengan UMKM tersebut, tentunya modal sosial penting untuk mengoptimalkan strategi yang digunakan. Jadi bukan hanya faktor pendukung dalam mempertahankan kualitas produk akan tetapi dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 desa Kurau Barat, hal ini membuat modal sosial itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung untuk proses mempertahankan perekonomian keluarga UMKM.

Berdasarkan teori modal sosial Robert Putnam menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial untuk mencapai tujuan secara bersama yang mana perlunya jaringan, kepercayaan, dan norma yang terjalin dengan baik maka dari itu perlu jaringan yang luas untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien, ketika adanya kerjasam itu semakin memperluas jaringan dan kepercayaan terhadap UMKM yang dimiliki. Pada penelitian ini untuk mempertahankan perekonomian keluarga UMKM ditengah pandemi Covid 19 tentunya ada yang mengelola usahanya masing-masing untuk tetap mempertahankan usaha ada relasi juga dan bersama untuk bekerjasama.

Penelitian ini yang menjadi aktor yaitu pelaku usaha dan masyarakat desa Kurau Barat. Pada teori modal sosial Robert Putnam

terdapat tiga komponen utama yaitu jaringan, kepercayaan dan norma.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka penelitian mengambil kesimpulan bahwa strategi mempertahankan perekonomian keluarga di tengah pandemi Covid 19 desa Kurau Barat, kecamatan Koba merupakan kawasan pesisir yang memang memiliki potensi dan peluang untuk tetap mempertahankan perekonomian keluarganya di tengah pandemi Covid 19 ini dengan berbagai cara untuk proses mempertahankan UMKM yang ada di desa Kurau Barat. Pertama, faktor penghambat itu pertama dampak pandemi Covid 19 yang mana setiap UMKM terdampak dari penjualan sehingga berkurangnya penghasilan yang dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha UMKM, kedua, modal yang menjadi penghambat juga dikarenakan pelaku usaha yang ingin bermodal untuk produksi kurang dan untuk meminjam uang di bank juga berkaitan dengan pandemi ini, serta ketiga, berkurangnya pembeli dan produksi ini tentu sangat berpengaruh karena banyak masyarakat yang merasakan situasi sekarang pembeli kurang dan terhambatnya proses produksi yang biasanya lancar sekarang kurang lancar untuk berproduksi. faktor pendukung yaitu terdapat potensi pengolahan ikan yang ada di desa Kurau Barat itu dengan adanya sumber daya alam yang tersedia tentunya harus dimanfaatkan untuk usaha yang sekarang sedang dijalani itu UMKM.

Kedua, dukungan dari keluarga dengan adanya dukungan dari keluarga tentu bisa membantu usaha terus berkembang dan memasarkan produk dengan bantuan keluarga itu berkaitan juga dengan proses produksi dan pemasaran. Ketiga, dukungan pemerintah dengan adanya dukungan dari pemerintah tentu saja ini merupakan suatu hal yang harus dikaitkan dikarenakan untuk usaha sehingga UMKM yang ada di desa Kurau Barat itu ada pemerintah yang selalu mendukung untuk keberlangsungan usaha seperti diberikannya bantuan terhadap UMKM. Strategi yang sudah dilakukan dalam mempertahankan perekonomian keluarga UMKM di tengah pandemi Covid 19 desa Kurau Barat, kecamatan Koba serta yang memang akan diterapkan untuk kedepannya yaitu: pertama, upaya

mempertahankan usaha keluarga itu dengan cara tetap memproduksi dan produksi sesuai pesanan konsumen. Kedua, meningkatkan promosi online yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk yang dijual supaya bisa memudahkan mengupdate produk. Ketiga, mempertahankan kualitas produk itu penting untuk tetap bisa menjaga cita rasa dalam sebuah produk yang mana itu berpengaruh untuk konsumen yang sudah membeli produk yang kita produksi. Keempat, kerjasama antar UMKMyang dibutuhkan juga untuk menjalankan usaha itu perlu dikarenakan kerjasama ini bisa saling menguntungkan.

Sarannya dalam penelitian ini bagi peneliti perlunya peneliti melihat perkembangan di usaha keluarga UMKM ini tetap mempertahankan usahanya walaupun disituasi seperti saat ini. Bagi masyarakat supaya bisa tetap berpartisipasi di UMKM hal ini tentu akan berdampak luas untuk masyarakat itu sendiri jika usaha keluarga UMKM yang ada di desa Kurau Barat berjalan dengan optimal. Dan bagi pemerintah selalu memebrikan solusi dan cara agar UMKM yang ada di desa Kurau Barat terus bisa mempertahankan usahanya walaupun terdapat beberapa faktor penghambat dan pendapatan berkurang agar pemerintah selalu mendukung keluarga yang mempunyai UMKM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian yang sudah penulis selesaikan khususnya kepada pembimbing yang selalu memberikan arahan dan nasihat dalam melakukan penelitian ini serta kepada teman-teman yang ikut serta membantu peneliti dalam melakukan pengambilan data serta telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penelitian yang dilakukan sehingga sudah berjalan dengan baik dan penelitian terselesaikan dengan lancar.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, Jhon W. 2017. Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif, Dan Mixed. Pustaka Pelajar.  
David, Fred R. 2011. Strategi Manajemen. Buku 1. Edisi 12 Jakarta.  
Field, Jhon. 2018. Modal Sosial. Bantul: Kreasi Kencana.

Goode, Wiliam J. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta. PT Bumi Aksara.  
Haryanto, Sindung. 2016. Sosiologi Ekonomi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.  
Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.  
Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya  
Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.  
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media  
Rahman, Bustami & Ibrahim. 2009. Menyusun Proposal Penelitian.  
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.  
Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press  
Suyanto, Bagong. 2017. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana.



**Korespondensi**

Email : priantoro20049@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

## **INOVASI SOSIAL KEBERSIHAN : STUDI TENTANG PENDIDIKAN HIDUP SEHAT DI KOMUNITAS PETOJO BINATU RT 02 RW 08 JAKARTA PUSAT**

**Priantoro Krisie Nugroho**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi  
Banten | Jl. Syech Nawawi Al Bantani No 2, Curug, Kota Serang  
42171

Disetujui: 25 April 2022

**Abstract**

*The focus of this study aims to describe changes in social behavior that occur in the Petojo Binatu I community RT 02 RW 08. Social changes have occurred since the presence of hygiene programs initiated by foreign institutions, namely USAID (United States Agency for International Developments) assisted by local institutions like Mercy Corps. At first, the Petojo Binatu area was better known as one of the slum areas or slump areas in Jakarta. However, since the implementation of the sanitation program, namely MCK Plus in 2007, the Petojo Laundry area has now turned into a pilot area.*

**Keywords:** MCK Plus, Behavior, Cleaning Program, Community

**Abstrak**

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan perilaku sosial yang terjadi pada komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08. Perubahan sosial terjadi sejak hadirnya program-program kebersihan yang diprakarsai oleh lembaga asing yaitu USAID (United States Agency for International Developments) yang dibantu oleh lembaga lokal seperti Mercy Corps. Pada awalnya, kawasan Petojo Binatu lebih dikenal sebagai salah satu wilayah kumuh atau slump area di Jakarta. Akan tetapi, sejak bergulirnya program kebersihan yaitu MCK Plus pada tahun 2007, kini wilayah Petojo Binatu berubah menjadi kawasan percontohan.

**Kata Kunci:** MCK Plus, Perilaku, Program Kebersihan, Komunitas

## I. PENDAHULUAN

Petojo Binatu dikenal sebagai daerah terpinggirkan dan berpredikat jelek (kurang baik). Kawasan pemukiman yang berpetak-petak dan sempit, ditambah padatnya penduduk dan lingkungan yang kotor menjadikan Petojo Binatu sebagai salah satu wilayah tak terawat dengan sanitasi yang buruk yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Akan tetapi, secara bertahap komunitas Petojo Binatu mulai melakukan perubahan. Tahap awal perubahan di komunitas Jalan Petojo Binatu adalah memperbaiki sanitasi lingkungan. Sanitasi merupakan hal yang penting dalam kesehatan lingkungan, mengingat sanitasi sebagai upaya untuk mengurangi resiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Masalah sanitasi sering muncul di kawasan pemukiman padat yang tidak tertata, terutama pemukiman perkotaan. Sanitasi yang buruk akan berdampak terhadap perubahan lingkungan.

Hadirnya USAID (*United States Agency for International Developments*) memberikan solusi untuk mengatasi masalah sanitasi lingkungan. Gagasan tersebut diiringi oleh masuknya program bantuan kebersihan yang dibawa oleh lembaga USAID yang dibantu oleh beberapa LSM lokal. Komunitas Petojo membuat suatu terobosan baru dengan hadirnya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh warga sekitar melalui program kebersihan MCK Plus.

Perubahan sosial terjadi sejak munculnya MCK Plus di komunitas Petojo Binatu. Pada umumnya, masyarakat lebih mengenal MCK (Mandi Cuci Kakus) sebagai sarana penunjang kebersihan untuk melakukan kegiatan seperti mandi, mencuci dan buang air. Di samping itu, banyak masyarakat menilai MCK sebagai sarana kumuh dan kotor. Padahal, keberadaan MCK dalam suatu komunitas merupakan salah satu cermin kebersihan lingkungan. Ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap kebersihan. Seperti yang terjadi pada komunitas Petojo Binatu. Wilayah Petojo Binatu dahulu lebih dikenal sebagai salah satu kawasan kumuh dan miskin di Jakarta. Hadirnya program MCK Plus menghilangkan kebiasaan buruk komunitas Petojo Binatu. Keberadaan MCK Plus ditengah masyarakat berdampak pada perubahan perilaku sosial kebersihan di komunitas Petojo Binatu. Adanya program MCK Plus dikomunitas

Petojo Binatu tidak hanya digunakan sebagai sarana penunjang kebersihan, melainkan juga difungsikan sebagai sumber energi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan penunjang kegiatan komunitas Petojo Binatu.

Menurut Amos “pentingnya pendidikan lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi ujung tombak bagi pemulihan kerusakan lingkungan di Jakarta saat ini.” Pendidikan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh beberapa pihak maupun elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk generasi mendatang dan yang akan datang.

Sejak lahirnya program MCK Plus yang diprakarsai oleh peran lembaga asing maupun lokal dan juga partisipasi masyarakat menjadikan kawasan Petojo Binatu sebagai wilayah yang memiliki sanitasi lingkungan yang baik. Program MCK Plus merupakan proyek lingkungan yang lahir atas peran lembaga asing, yaitu USAID (*United States Agency for International Developments*) yang dibantu oleh beberapa lembaga lokal (LSM) seperti *Mercy Corps*. Masuknya lembaga asing dan lokal membawa dampak positif terhadap lingkungan dan sanitasi komunitas Petojo Binatu. Selain itu, munculnya program MCK Plus secara bertahap mengubah perilaku buruk masyarakat untuk memulai kehidupan yang bersih dan sehat. Dalam konteks perubahan sosial yang terjadi pada komunitas Petojo Binatu, perubahan perilaku kebersihan di kawasan Petojo Binatu dan adanya program MCK Plus merupakan agen perubahan perilaku hidup bersih pada komunitas Petojo Binatu.

Gerakan-gerakan peduli lingkungan yang muncul menjadi pendidikan sosial (*Social Education*) bagi masyarakat awam yang belum memahami lingkungan sehat dengan sesungguhnya. Menurut Amos “inti dari pendidikan kebersihan lingkungan adalah berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak hanya tahu tentang pencemaran, sampah, penghijauan dan sebagainya, akan tetapi sadar dan bertanggung

jawab menyesuaikan perilaku norma-norma yang menjamin kelestarian lingkungan serta merintis tindakan untuk memelihara lingkungan hidup.”

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan tak terlepas dari pendidikan lingkungan yang diperoleh komunitas Petojo Binatu dari kehadiran program-program kebersihan lingkungan yang diprakarsai oleh lembaga asing yaitu USAID (*United States Agency for International Developments*) dan beberapa lembaga lokal. Upaya yang telah dilakukan oleh komunitas Petojo Binatu mendapatkan hasil yang cukup baik, komunitas Petojo Binatu saat ini menjadi kawasan percontohan kebersihan lingkungan dan dijadikan pilot project di wilayah Jakarta Pusat. Bahkan, komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 menjadi daerah yang dapat menghasilkan energi biogas secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi pengolahan limbah pada MCK Plus.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Cresswell didefinisikan “sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan ciptaan gambaran holistik (lengkap dan menyeluruh) yang dideskripsikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh pola identitas sosial mengenai organisasi tingkat lokal maupun internasional dalam menciptakan masyarakat yang berdaya melalui pendidikan kebersihan lingkungan, yaitu adanya MCK Plus sebagai agen perubahan perilaku sosial kebersihan. Metode yang digunakan adalah studi kasus sebagai gambaran ruang lingkup yang lebih luas. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan agar tergambar tema penelitian dengan jelas.

Untuk memperoleh informasi dalam meneliti, peneliti mewawancarai informan kunci yaitu ketua RW selaku penanggung jawab program kebersihan dan ketua RT 02 RW 08 selaku pelaksana program. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri atas 4 anggota komunitas Petojo Binatu RT 02 RW 08 yang berpartisipasi dan aktif dalam program kebersihan lingkungan.

Dalam hal ini peneliti menjadi peneliti partisipatoris. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, sehingga memudahkan peneliti dalam pencarian data dan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Semua elemen ini merupakan faktor utama dalam kesuksesan komunitas Petojo Binatu, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Program Pendidikan Kebersihan melalui MCK Plus

Kawasan Petojo Binatu merupakan salah satu wilayah yang berada di pusat kota Jakarta. Lokasi Petojo Binatu berada sekitar 1 km pusat perbelanjaan Mal Gajah Mada. Selain itu, wilayah Petojo Binatu I RT 02 RW 08 juga berada di kawasan pusat bisnis, karena berada tak jauh dari rukan-rukan maupun kompleks perkantoran. Terlepas dari keberadaan wilayah Petojo Binatu yang tepat berada di pusat kota, keadaan lingkungan Petojo Binatu sangat memprihatinkan. Keadaan wilayah Petojo Binatu termasuk ke dalam wilayah *slump area* atau kawasan kumuh. Pada era 1990 sampai awal tahun 2000, komunitas Petojo Binatu selalu bergulat dengan keadaan sanitasi lingkungan yang buruk. Keterbatasan dan ketiadaan fasilitas umum di Petojo Binatu, menjadikan komunitas Petojo Binatu seakan akrab dengan berbagai penyakit. Perilaku hidup bersih seperti menjauh dari kesadaran komunitas Petojo Binatu. Komunitas Petojo Binatu sering menggunakan air di kali krukut untuk memenuhi segala keperluan dan aktivitas mereka, seperti mencuci dan kegiatan MCK. Tanpa mereka sadari, kebiasaan tersebut menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan.

Pada awal tahun 2000an wilayah Petojo Utara, khususnya komunitas Jalan Petojo Binatu I RT 02 RW 08 dikenal sebagai daerah terpinggirkan dan berpredikat jelek. Kawasan pemukiman yang berpetak-petak dan sempit. Ditambah padatnya penduduk dan tak terawatnya lingkungan menjadikan kawasan Petojo Binatu sebagai salah satu daerah “kumis” yaitu kumuh dan miskin yang ada di wilayah DKI Jakarta.



Gambar 1. Kondisi MCK pada masa AMD

Pada masa program MCK AMD, komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 hanya dijadikan sebagai objek semata. Keterbatasan fasilitas MCK dan sosialisasi yang tidak tepat sasaran menjadikan program MCK AMD tidak berjalan maksimal. Hal itu ditandai oleh penggunaan MCK AMD yang berlangsung singkat. Program yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, tidak mampu mempengaruhi konsepsi kebersihan pada komunitas Petojo Binatu, kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan tergolong rendah. Ketika program AMD berakhir, banyak anggota komunitas yang kembali pada kebiasaan lama, yaitu menggunakan kali krukut sebagai sarana penunjang kebersihan.

Pada dasarnya manusia selalu dalam proses yang tidak berhenti dan tidak pernah selesai untuk mengubah suatu keadaan. Sama halnya dengan komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 yang secara bertahap mampu mengubah kebiasaan buruk dalam mengatasi masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan. Keadaan lingkungan komunitas Petojo Binatu mulai mengalami perubahan di awal tahun 2007. Diawali dengan datangnya program bantuan yang diprakarsai oleh pihak lembaga asing, yaitu USAID (*United States Agency for International Developments*) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) diantaranya Mercy Corps. Kemewahan fasilitas MCK Plus membuat komunitas Petojo Binatu sangat antusias terhadap program yang akan mengubah keadaan lingkungan dan sanitasi di kawasan Petojo Binatu I RT 02 RW 08. Masuknya program kebersihan yang diprakarsai oleh lembaga asing dan lokal di harapkan mampu memberikan perubahan bagi komunitas Petojo Binatu dalam menciptakan kawasan yang terawat dengan sanitasi lingkungan yang baik.



Gambar 2. Kondisi MCK Plus USAID

Program MCK Plus yang sudah berjalan pada komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 menjadi suatu cara dalam menciptakan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan. Kebersihan sudah menjadi masalah rutin dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus menyadari apa itu kebersihan. Dalam penerapan hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri tempat tinggal (rumah) dan lingkungan dengan sanitasi yang baik.

## B. MCK Plus sebagai Agen Perubahan Sosial Kebersihan Komunitas Petojo Binatu

Sejak berdirinya, MCK Plus memberikan sarana penunjang kebersihan bagi komunitas Petojo Binatu. Peningkatan kualitas MCK Plus terus dilakukan oleh pihak aparaturnya maupun RT/RW. Mulai dari fasilitas kamar mandi hingga pengadaan dapur umum menjadi dasar dalam menggalakkan hidup atas dasar kebersihan. Sebagai sistem sosial, munculnya MCK Plus ditengah kehidupan komunitas memiliki fungsi dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Sementara itu, sistem-sistem sosial merujuk pada praktik-praktik sosial yang direproduksi. Praktik-praktik sosial yang direproduksi ini adalah kegiatan-kegiatan yang terikat pada ruang dan waktu tertentu yang diadakan kembali dalam lintas ruang dan waktu yang secara berulang melibatkan struktur di dalamnya. MCK Plus yang berperan sebagai agen perubahan perilaku sosial, memiliki fasilitas kebersihan

yang memadai bagi komunitas yang memanfaatkan MCK sebagai sarana penunjang kebersihan. Perubahan sosial dalam komunitas Petojo Binatu bukan merupakan suatu hasil tetapi merupakan suatu proses menuju kehidupan yang berbasis pada kebersihan lingkungan.

Sebagai agen perubahan perilaku sosial kebersihan bagi komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08, MCK Plus mampu mewujudkan komunitas yang peduli terhadap kebersihan. Untuk itu, keberadaan MCK Plus adalah wadah penunjang kegiatan kebersihan, karena banyak anggota komunitas Petojo Binatu yang tidak memiliki fasilitas kebersihan seperti kamar mandi di tempat tinggal masing-masing. Selain itu, dengan adanya MCK Plus, komunitas Petojo Binatu memahami arti dari kebersihan. Di lain pihak, adanya MCK Plus juga mengajarkan untuk mengolah limbah berbasis teknologi, untuk mengubah limbah menjadi energi alternatif.

Di tengah kelangkaan energi yang terjadi saat ini, pemanfaatan energi biogas yang diperoleh dari limbah MCK Plus merupakan langkah awal mengatasi kelangkaan energi. Sejak dibangun, MCK Plus ini dilengkapi teknologi baffled reactor yang menyaring air agar limbah yang dihasilkan ramah lingkungan. Sistem kerjanya, air bekas mandi atau mencuci disaring dalam suatu reaktor sehingga menghasilkan grey water yang menghilangkan bakteri ecoli. MCK Plus adalah program yang ramah lingkungan karena juga dilengkapi dengan teknologi *Decentralized Wastewater Treatment System* (DEWATS). Dengan teknologi ini, 90% air limbah dapat dimurnikan kembali sehingga tidak mencemari lingkungan dan kali krukut yang berada di kawasan Petojo Binatu I RT 02 RW 08. Teknologi DEWATS limbah yang dihasilkan oleh MCK Plus dipisah menjadi limbah cair (*urine*, air busa/detergen) dan padat (*feces*) untuk diolah menjadi sumber energi biogas. Energi biogas yang dihasilkan MCK Plus langsung disalurkan menuju sebuah dapur yang berdampingan dengan keberadaan MCK Plus.

### C. Perubahan Perilaku Terhadap Lingkungan

#### Komunitas Petojo Binatu sebelum Ada MCK Plus

Kawasan Petojo Binatu I RT 02 RW 08 yang terletak di sekitar kali krukut memiliki sanitasi yang buruk akan lingkungan. Hal itu di tandai dengan kebiasaan buruk di masyarakat yang mengalihfungsikan kali krukut sebagai fasilitas penunjang kebersihan seperti mandi, cuci maupun kakus. Kesadaran komunitas Petojo Binatu akan pentingnya hidup bersih dan sehat masih rendah. Hal itu terlihat dari sikap dan kebiasaan yang dilakukan setiap masyarakat dalam usaha memelihara kebersihan lingkungan

Pada masa program MCK AMD, komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 hanya dijadikan sebagai objek semata. Keterbatasan fasilitas MCK dan sosialisasi yang tidak tepat sasaran menjadikan program MCK AMD tidak berjalan maksimal. Hal itu ditandai oleh penggunaan MCK AMD yang berlangsung singkat. Program yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, tidak mampu mempengaruhi konsepsi kebersihan pada komunitas Petojo Binatu, kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan tergolong rendah. Ketika program AMD berakhir, banyak anggota komunitas yang kembali pada kebiasaan lama, yaitu menggunakan kali krukut sebagai sarana penunjang kebersihan.

#### Komunitas Petojo Binatu sesudah Ada MCK Plus

Diawali dengan datangnya program bantuan yang diprakarsai oleh pihak lembaga asing, yaitu USAID (*United States Agency for International Developments*) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) diantaranya Mercy Corps. Partisipasi komunitas Petojo Binatu terhadap program MCK Plus sudah mulai tumbuh. Begitu juga dengan kesadaran komunitas Petojo Binatu terhadap kebersihan lingkungan yang sudah mengakar. Keterlibatan komunitas dalam menyelenggarakan program kebersihan merupakan wujud nyata untuk menciptakan lingkungan dengan sanitasi yang baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 untuk memelihara kebersihan dan sanitasi lingkungan mempunyai kaitan erat dengan pandangan komunitas tentang lingkungannya.

Selain sebagai sarana penunjang kebersihan, MCK Plus juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Program MCK Plus yang sudah berjalan pada komunitas Petojo Binatu I RT 02 RW 08 menjadi suatu cara dalam menciptakan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.

Pola hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Lahirnya program pendidikan kebersihan dan sanitasi lingkungan yaitu melalui program MCK Plus merupakan awal perubahan menguatnya perilaku sosial kebersihan di komunitas Petojo Binatu. Pada tahun 2000an kawasan Petojo Binatu lebih dikenal sebagai kawasan kumuh dan tak terawat. Begitu juga dengan kondisi komunitas Petojo Binatu, hanya 60% komunitas Petojo Binatu yang menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas, sisanya bahkan ada yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dalam hal ekonomi komunitas Petojo Binatu tergolong masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Disamping itu, tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah membuat komunitas Petojo Binatu hidup dengan sanitasi yang buruk. Tak dipungkiri kehidupan komunitas Petojo Binatu Petojo Binatu I RT 02 RW 08 selalu berdampingan dengan berbagai macam penyakit, seperti demam dan diare. Kemunculan program MCK yang diprakarsai pada masa (ABRI Masuk Desa) belum tepat sasaran. Masih banyak anggota komunitas yang mengalihfungsikan kali krukut yang tepat berada di sekitar pemukiman komunitas sebagai sarana penunjang kebersihan.

Program kebersihan yang diprakarsai oleh lembaga asing USAID (*United States Agency for International Developments*) dan lembaga lokal membawa kehidupan baru di komunitas Petojo Binatu. Kolaborasi antara lembaga USAID dan lembaga lokal membawa perubahan positif bagi komunitas Petojo Binatu yaitu kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik. Komunitas Petojo Binatu Petojo Binatu I RT 02 RW 08 sangat antusias dan menyambut gembira terhadap program kebersihan yang akan

mengubah kondisi kawasan Petojo Binatu. Kini, dalam beberapa tahun terakhir, perilaku buruk komunitas Petojo Binatu berubah setelah tersedianya MCK Plus. Kehidupan komunitas Petojo Binatu berangsur-angsur pulih. Hal itu dibuktikan melalui perilaku komunitas Petojo Binatu yang memanfaatkan MCK Plus sebagai sarana penunjang kebersihan. Penggunaan MCK plus secara bijak dan bertanggung jawab merupakan wujud nyata komunitas Petojo Binatu dalam melaksanakan program kebersihan. Sehingga, kawasan Petojo Binatu saat ini menjadi kawasan percontohan di wilayah Jakarta Pusat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan naskah ini. Selain itu, penulis memberikan apresiasi kepada komunitas Petojo Binatu atas bantuan dan partisipasi dalam penulisan ini. Peneliti juga berterima kasih kepada tim redaksi yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan tulisan ini.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. 2000. Teknik Pengumpulan Data. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Atosokhi, Antonius. 2005. Relasi dengan Dunia (Alam, IPTEK, Kerja). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Budiono. 2003. Kamus Bahasa Indonesia Baku. Surabaya: Alumni.
- Colleta, Nat J. 1987. Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cresswell, John W. 2002. Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: KIK.
- Daryatno. 2010. Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamal, Zoer'aini. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota, Jakarta: Bumi Aksara.
- Giddens, Anthony. 2004. The Constituion of Society: Teori Struktural Untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati.
- Kamisa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern (KBBIM). Surabaya: Amelia.

- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
- Notoadmodjo. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Pryono, B. Herry. 2002. Anthony Giddens: Suatu Pengantar, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George & Godman, J Douglas. 2003. Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media.
- Takwin, Bagus. 2005. Kesadaran Plural Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soemarwoto, Otto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan.



**Korespondensi**  
Email1 : renia.mala26@gmail.com  
Email2 : bustami.rahman@gmail.com  
Email3 : sarpinfarras@gmail.com



**Inovbook Publications**  
Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

# **POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SEBAGAI INOVASI DI DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA TAHUN 2020**

**Renia<sup>1\*</sup>, Bustami Rahman<sup>2\*</sup>, Sarpin<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,  
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 April 2022

## **Abstract**

*Politics Implementation of Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Program (BSPS) in Jelutung II Village, Simpang Rimba Subdistrict in 2020 (Supervised by Bustami Rahman and Sarpin). Implementation is an activity, action, and exercise. However, implementation is not just an ordinary activity, but implementing planned activities to achieve a set goal. The purpose of this research is to find out the politics implementation of Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program and to analyze the supporting and hindering factors for implementing the BSPS program in Jelutung II Village. This study used the theory of policy implementation from Merilee S. Grindle as the basis for the research. Related to concept of policy implementation, there were two major variables. First, the content of the policy had six other indicators, namely: a) The interests of the objective group (target group). b) The types and benefits received by the target group. c) The degree of change desired. d) The location of a program. e) Program implementation or implementers. f) Resources. Second, based on the policy environment, there were three other indicators, namely: a) The power, interests, and strategies of the actors involved. b) Characteristics of institutions and authorities c) Compliance and responsiveness. The results of this study indicated that implementing Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program in Jelutung II Village, Simpang Rimba District had been implemented even though it was running less effectively. Based on several policy implementation factors, according to Grindle, there were some less effective in implementing the BSPS program policies in Jelutung II Village. It could be seen from the time of determining the prospective beneficiaries of assistance, there were still inappropriate recipients, delays in construction goods and limitations of the existing budget from the beneficiaries. The supporting factor of the BSPS program in Jelutung II Village was the good quality of building materials. The inhibiting factors were the weather, the availability of builders and delays in building materials.*

**Keywords:** Policy, Implementation, BSPS, Jelutung II Village

## **Abstrak**

Implementasi merupakan suatu aktivitas, aksi dan tindakan. Namun, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas biasa, melainkan pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui politik implementasi program bantuan stimulan

perumahan swadaya (BSPS) dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai landasan dasar penelitian. Terkait konsep implementasi kebijakan tersebut terdapat dua variabel besar yakni, yang pertama isi kebijakan yang terdapat enam indikator lainnya yaitu; a) kepentingan kelompok sasaran (target group). b) jenis dan manfaat yang diterima oleh target group. c) derajat perubahan yang diinginkan. d) letak sebuah program. e) pelaksanaan program atau implementor. f) sumber daya. Kemudian yang kedua berdasarkan lingkungan kebijakan terdapat tiga indikator lainnya yaitu: a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) karakteristik lembaga dan penguasa c) kepatuhan dan daya tanggap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba sudah terimplementasi walaupun berjalan kurang efektif. Berdasarkan dari beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan menurut Grindle terdapat beberapa yang kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakan program BSPS di Desa Jelutung II. Hal tersebut terlihat dari pada saat penentuan calon penerima bantuan masih terdapat penerima yang kurang tepat serta adanya keterlambatan barang bangunan dan keterbatasan dari anggaran yang ada dari penerima bantuan. Faktor pendukung dari program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, kualitas bahan bangunan yang bagus. Adapun faktor penghambatnya ialah cuaca, ketersediaan tukang bangunan dan keterlambatan bahan bangunan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Implementasi, BSPS, Desa Jelutung II

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik menurut Suciati Annisa (2017) adalah beberapa aktivitas pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam masyarakat. Tidak hanya berhenti pada proses pembuatan kebijakan, namun juga terdapat proses implementasi dari kebijakan yang menjadi variabel penting yang berpengaruh pada

keberhasilan dari kebijakan tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI). Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Selain itu, adapun tujuan utama dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, sehat dan bersih. Hal tersebut tertera dalam peraturan Kementerian PUPR No 07 Tahun 2018 tentang BSPS Bab I Pasal 1 ayat (1) berbunyi: BSPS adalah bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah serta pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kriteria-kriteria penerimaan dari program BSPS yaitu, Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi yang tidak layak huni, tidak pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan paling banyak upah minimum provinsi, bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng. Jadi hal diatas lah yang menjadi pertimbangan bagi penerima program BSPS. Kriteria-kriteria diatas terdapat dalam peraturan PUPR No 07 Tahun 2018 tentang BSPS Bab IV pasal 11 Ayat (1).

Akhir tahun 2019, di Kecamatan Simpang Rimba terdapat beberapa Desa yang mengajukan program BSPS salah satunya yaitu Desa Jelutung II. Dalam proses pengajuan program BSPS terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Desa yang bersangkutan yaitu, membuat proposal dan memberi nama-nama calon penerima bantuan yang kemudian dikirim ke PUPR Kabupaten Bangka Selatan.

Alasan pemerintahan Desa Jelutung II mengajukan program BSPS yaitu, membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas

hunian yang layak. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Oleh karena itu, dengan adanya program BSPS pemerintah berharap dapat membantu masyarakat sesuai dengan Undang-Undang diatas dengan memberikan kehidupan yang layak, aman, tenang dan bahagia bagi setiap orang yang benar-benar membutuhkan.

Namun, dalam pelaksanaan dari program BSPS terdapat beberapa kendala salah satunya, komunikasi antara perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS dengan masyarakat, mengenai adanya program BSPS serta rincian dari program BSPS tersebut. Sehingga menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat yang mendapatkan bantuan dari program BSPS. Masyarakat merasa khawatir mengenai kekurangan biaya dalam pembangunan rumah. Dimana mereka tidak mempunyai biaya lebih untuk menutupi semua jenis kekurangan dalam proses pembangunan tersebut. Karena hal tersebut akan membawa mereka kepada permasalahan yang baru bagi mereka.

Selain itu, diharapkan dalam proses pembangunan rumah tenaga fasilitator lapangan (TFL) harus berada di lapangan sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep pelaksanaan program BSPS. Namun, kenyataannya dilapangan TFL tidak bertugas sebagaimana mestinya, yang seharusnya TFL mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumah, namun hal tersebut tidak dilakukan dengan baik dan lagi pada proses penentuan pemilihan calon penerima bantuan BSPS lebih mengutamakan kerabat dekat, keluarga, teman dan keluarga.

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif deskriptif. Menurut Idrus (2009) penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang meneliti informan sebagai objek penelitian secara mendalam, serta menganalisis segala aktivitas dari objek penelitian tersebut. Dengan demikian, pengertian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang

melakukan penelitian dengan melihat objek penelitian secara mendalam. Penelitian ini dapat berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara wajar. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan dalam mengkaji "Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020".

### Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian ini terhitung dari bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba agar lebih memudahkan peneliti untuk turun lapangan.

### Target/Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jelutung II, perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba.

### Prosedur

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020. Dalam penentuan informan tersebut peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk kedalam kriteria dari judul penelitian peneliti.

Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengambil sebuah data dengan cara mengamati dan memperhatikan secara langsung pada Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak

mengikuti pedoman wawancara yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti lebih bebas menentukan pertanyaan tetapi tidak lepas dari hal utama dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jelutung II, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSP di Desa Jelutung II dan Perangkat Desa Jelutung II yang bertanggung jawab dalam program BSPS.

### 3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data berupa buku-buku, berita dan artikel dari internet, beserta dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk sumber data atau informasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti, seperti wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder menurut Rahman dan Ibrahim (2009) merupakan sumber data penunjang atau sumber data tambahan, seperti buku serta dokumen peraturan yang sesuai dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang menerima Program Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2019. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai inovasi dari pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada, seperti rumah tidak layak huni, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

### A. Politik implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Jelutung II tahun 2020

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Marilee S. Grindle dalam Subarsono tahun (2021) yang terdapat dua variabel besar, yaitu 1) isi kebijakan, 2) lingkungan kebijakan.

1. Isi kebijakan mencakup beberapa indikator sebagai berikut;

#### a. Kepentingan kelompok sasaran

Pada dasarnya sebuah kebijakan yang dirancang harus memiliki tujuan dan target yang jelas. Dalam program BSPS sudah dijelaskan bahwa target dari program BSPS, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: BSPS ialah bantuan dari pemerintah untuk MBR yang mempunyai keterbatasan daya beli. Dengan adanya keterbatasan tersebut masyarakat sulit untuk membangun rumah yang layak huni sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan yang pemerintah berikan dalam program BSPS bukan berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang dibeli dari toko bangunan terdekat oleh perangkat Desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan didampingi oleh penanggung jawab program BSPS di Kabupaten. Adapun jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 17.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut, Rp 15.000.000,00 untuk bahan bangunan dan Rp 2.500.000,00 untuk upah pembangunan rumah.

Dengan demikian kebijakan dari program BSPS mengenai sasaran atau *target group* yang dituju sudah sangat jelas. Dalam kebijakan sudah disebut target dari program BSPS ini merupakan Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR). Melihat dari isi kebijakan mengenai target dari kebijakan tersebut sudah sangat baik, hanya tinggal implementasi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan program BSPS sudah sangat matang dan terencana. Dimana dalam kebijakan tersebut sudah disebutkan dengan baik target utama program BSPS.

#### b. Jenis dan manfaat yang diterima oleh *target group*

Program BSPS merupakan program yang dirancang sesuai dengan persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat. Dari persoalan-persoalan tersebut dapat menghasilkan suatu solusi dari pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan maupun program. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah tidaklah sedikit, salah satunya, yaitu kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu, dengan adanya program BSPS diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Denga demikian program BSPS diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya program ini dapat memberikan suatu perubahan yang baik bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat membangun sebuah rumah layak huni dengan bantuan pemerintah, sehingga mereka dapat menempati rumah yang aman dan bersih. Sebab dari itu, program BSPS dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang pada awalnya menempati rumah yang tidak layak huni dapat membantu mereka menempati rumah yang layak huni yang lebih bersih, nyaman dan memberikan perasaan yang aman bagi penghuninya.

#### c. Derajat perubahan yang diinginkan.

Program BSPS merupakan Program yang dirancang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dikalangan masyarakat. Dengan begitu perubahan yang diinginkan harus berpihak kepada masyarakat. Dari implementasi program BSPS diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar bagi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga program tersebut dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Adapun perubahan yang diinginkan atau diharapkan dalam program BSPS, yaitu setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat menempati Rumah yang layak huni. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan dapat menekankan angka kemiskinan serta

dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### d. Letak sebuah program

Program BSPS merupakan program yang dirancang khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Sedangkan rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan keamanan. Sementara itu, pada proses implementasi dari program BSPS terdapat suatu hal yang mengganjal di masyarakat. Dimana sasaran atau target utama yang seharusnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dirasa kurang tepat sasaran. Sedangkan hal tersebut sudah tertulis dalam peraturan menteri PUPR tahun 2018 bahwa BSPS merupakan program untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

MBR ialah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan pendapatan dibawah tiga juta perbulan. Oleh karena itu, dengan kata lain masyarakat ini tergolong ke dalam masyarakat yang kurang mampu, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya salah satunya rumah layak huni.

Sedangkan penerima bantuan program BSPS rata-rata pendapatan yang mereka raih perbulan lebih dari empat juta bahkan ada yang mencapai angka enam juta perbulan. Angka pendapat tersebut merupakan angka yang tidak masuk kedalam kategori penerima bantuan dari program BSPS dan sudah lebih dari upah minimum provinsi, karena dalam program BSPS yang dapat menerima bantuan tersebut ialah mereka yang memiliki penghasilan paling tinggi Upah Minimum daerah atau Provinsi. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 3.264.884,00 (tribunnews.com). Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran dari program BSPS di Desa Jelutung II kurang tepat. Seharusnya

sebelum menentukan penerima bantuan perangkat Desa dan TFL harus mengecek penghasilan dari masyarakat terlebih dahulu. Kemudian mulailah melakukan pengamatan atau pertimbangan dengan melibatkan partisipasi dari semua kalangan dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya itu dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II kurangnya pengawasan dari pihak Kabupaten dan TFL. Dimana seharusnya TFL dan pihak Kabupaten harus memastikan terlebih dahulu apakah penerima sudah pantas atau belum. Sehingga hal diatas merupakan salah satu penyebab dari kurang tepatnya sasaran program BSPS di Desa Jelutung II.

e. Pelaksana program atau implementor

Pelaksana atau implementor dalam suatu program merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan. Dimana pelaksana program ialah penggerak sebagai alat untuk mencapai tujuan dari termuatnya suatu kebijakan. Agen pelaksana atau implementor dari suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam indikator ini peneliti akan melihat kinerja agen pelaksana dalam suatu kebijakan, yaitu kebijakan mengenai program BSPS.

Program BSPS terdapat beberapa pelaksana yang berperan penting dalam proses implementasi di tingkat Desa, yaitu TFL yang dipilih melalui proses open recruitment dari SATKER (satuan kerja) PUPR dan perangkat Desa yang ditunjuk melalui perwakilan masyarakat dan perangkat Desa lainnya. Adapun tugas dari TFL yaitu sebagai pendamping dan membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan dari program BSPS agar dapat berswadaya secara berkelompok dalam membangun rumah yang layak huni. Sedangkan tugas dari perangkat Desa yaitu untuk memilih masyarakat yang pantas menerima bantuan tanpa berdasarkan kedekatan diri kepada calon penerima. Oleh karenanya keterlibatan para pelaksana

program BSPS diharapkan dapat membantu berjalannya implementasi dari program ini dengan efektif, transparansi dan akuntabel.

Implementasi program BSPS di Desa Jelutung II pelaksana atau implementor nya, yaitu TFL dan perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa Jelutung II tahun 2020 masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 18 Ayat kedua yang berbunyi bahwa kesepakatan calon penerima, pembentukan KPB, dan menentukan tokoh penyediaan bahan bangunan dalam program BSPS dilakukan melalui rembung warga. Sebab dari itu implementor dari program BSPS belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena, tidak mengikuti peraturan yang ada.

Dengan demikian, TFL dan perangkat Desa belum efektif dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga implementor dari program BSPS di Desa Jelutung II. TFL kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, apabila berada di lapangan TFL hanya mengambil foto rumah saja yang kemudian pergi tanpa adanya saran mengenai pembangunan rumah tersebut. Namun dalam peraturan disebutkan bahwa TFL seharusnya mendampingi penerima bantuan dari awal sampai akhir pembangunan termasuk memberikan arahan dalam proses pembangunan rumah.

f. Sumber daya

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya sumber daya yang baik sehingga dapat memberikan hasil yang positif serta berguna dalam mensukseskan suatu kebijakan maupun program. Sumber daya yang baik tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan dapat didukung dengan sumber daya yang berkualitas sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai di dalam bidangnya. Oleh karena itu dalam proses implementasi suatu kebijakan sangat dibutuhkan SDM agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Namun tidak hanya SDM saja yang sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi dari sebuah program, yaitu Sumber Daya Non Manusia, seperti mesin, material dan bahan-bahan yang lainnya. Namun dalam program BSPS adapun sumber daya yang dilibatkan yaitu SDM dan non SDM.

Pada proses pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) program prakerja sudah memulai dengan baik dengan melakukan Open Recruitment dan EVKIN (Evaluasi Kinerja) terhadap TFL BSPS. Tindakan ini merupakan suatu hal yang bagus bagi implementasi program BSPS yang melibatkan SDM yang berkompeten di bidangnya. Seperti TFL yang harus orang teknik engineer yang paham masalah konstruksi bangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini hal yang diperhatikan terlebih dahulu pada proses open recruitment dalam program BSPS. Namun apabila sudah pernah menjadi TFL BSPS di tahun-tahun sebelumnya, pihak PUPR akan melihat kinerja pada tahun sebelumnya.

Adapun sumber non SDM dalam program BSPS, yaitu seperti bahan material bangunan. Bahan material bangunan ini merupakan bahan bangunan yang berkualitas tinggi atau bagus. Sehingga rumah yang telah dibangun masyarakat memiliki kualitas bagus yang tidak membahayakan keselamatan penghuni, contohnya seperti pasir, semen atau batako harus memiliki kualitas yang bagus. Karena, apabila kualitas bahan material kurang bagus akan memberi efek buruk pada rumah itu sendiri, yaitu rumah akan menjadi mudah rusak dan hal ini sangat membahayakan penghuni rumah. Jadi dalam program BSPS sumber daya non manusia yang berkualitas juga berperan penting dalam pembangunan rumah. Namun untuk Desa Jelutung II sumber

daya non manusia yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan seperti bahan bangunan atau material sudah memiliki kualitas yang cukup bagus dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan lingkungan kebijakan
  - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Pada indikator ini peneliti akan fokus pada kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Menurut Marilee S. Grindle dalam Aziz Muhammad (2019) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor perlu diperhitungkan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi suatu program.

Bagian indikator ini dapat melihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa Jeutung II dan TFL BSPS di Desa Jelutung II, beserta dengan strategi yang mereka gunakan dalam implementasi dari program BSPS di Desa Jelutung II.

Implementasi program BSPS di Desa Jelutung II para implementor memanfaatkan peran mereka dalam memilih penerima bantuan dari program BSPS lebih mengutamakan orang-orang terdekat mereka sebagai penerima bantuan tersebut. Kemudian strategi dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih pada strategi ini diharapkan para implementor dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat tentang BSPS. Sosialisasi merupakan salah satu strategi yang harus dilaksanakan oleh para implementor dari program BSPS guna memperlancar proses dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu membangun rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu implementor dari implementasi program BSPS di Desa Jelutung II, sosialisasi diadakan hanya kepada ketua RT saja. Dari ketua RT dapat menyarankan siapa yang berhak

untuk menerima bantuan. Akan tetapi ketua RT di Desa Jelutung II sama sekali tidak terlibat dalam program BSPS baik dari pendataan maupun sosialisasi. Jadi proses implementasi dari program BSPS hanya melibatkan perangkat Desa TFL dan pihak Kabupaten dan tidak melibatkan ketua RT.

Hal ini merupakan bagian dari kendala dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai cara untuk menyampaikan informasi mengenai program BSPS di Desa Jelutung II kepada masyarakat apabila tidak boleh membuat suatu perkumpulan salah satunya yaitu mengirimkan surat perintah kepada ketua RT untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat program BSPS yaitu program pembangunan rumah untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat membantu perangkat Desa dan TFL dalam menjalankan tugasnya yang dapat melibatkan ketua RT dari Desa tersebut.

#### b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pada bagian ini akan melihat serta menjelaskan bagaimana karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan dari program BSPS di Desa Jelutung II. Karakteristik lembaga dan penguasa program BSPS dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi dari program BSPS itu sendiri di Desa Jelutung II.

Tugas perangkat Desa dalam program BSPS menunjukkan rumah penerima kepada pengantar bahan material sehingga tidak salah rumah dan mendata siapa yang pantas untuk menerima bantuan program BSPS. Pendataan tersebut dilakukan oleh perangkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah orang yang dianggap pantas untuk mendapatkan bantuan yang kemudian menawarkan bantuan ini kepada calon penerima tanpa harus mengutamakan orang-orang terdekat. Tetapi berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa perangkat Desa lebih mengutamakan orang-orang terdekat

untuk menerima bantuan dari program BSPS.

Perangkat Desa dan TFL harus tegas dalam menjalankan tugas dengan tidak mengutamakan pihak manapun tetapi sesuai dengan peraturan yang ada. Karena target dari program BSPS masih kurang tetap sasaran.

Dengan demikian pada indikator ini implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih kurang efektif. Dikarenakan, pada proses pemilihan calon penerima bantuan memilih dengan berdasarkan kedekatan sebagai keluarga, teman, dan kerabat dekat. Dimana seharusnya program BSPS ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berdasarkan kedekatan apapun, sehingga target utama dalam program tersebut dapat tercapai.

#### c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari para implementor merupakan salah satu faktor berhasilnya implementasi suatu program. Sejauhmana kepatuhan serta respon dari para pelaksana dalam tugas yang telah diberikan. Pada bagian ini peneliti akan melihat apakah para implementor mengetahui adanya peraturan mengenai program BSPS. peraturan yang akan menjadi patokan peneliti yaitu Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS telah mengetahui syarat-syarat penerima bantuan program BSPS dengan cukup baik. Namun dari penentuan penerima masih kurang efektif, karena dari beberapa persyaratan diatas masih ada yang belum terimplementasikan dengan baik oleh para implementor yang seharusnya mengutamakan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Maka dengan demikian pada indikator kepatuhan dan daya tanggap atau respon dari para implementor masih kurang efektif. Masih terdapat beberapa peraturan atau persyaratan yang diabaikan oleh para implementor. Implementor masih kurang

memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan adanya program BSPS ini. Dengan lebih mengutamakan mengutamakan orang terdekat merupakan salah satu ketidak patuhan implementor terhadap peraturan yang ada. Seharusnya implementor melakukan tugas dengan berpedoman dengan peraturan yang sudah ada yaitu peraturan kementerian No 07 tahun 2018 tentang program BSPS.

## **B. Faktor Pendukung Dan Penghambat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Jelutung II**

### **1. Faktor pendukung**

Mengenai faktor pendukung dalam program BSPS di Desa Jelutung II, yaitu jarak antara tempat toko bangunan tidak terlalu jauh dari Desa Jelutung II, sehingga hampir tidak ditemui bahan material yang cacat. Namun apabila dalam proses pengiriman bahan material terdapat yang cacat, maka pihak tokoh akan bertanggung jawab dengan menggantikan dengan bahan bangunan yang baru. Hal ini merupakan jadi faktor pendukung dari program BSPS di Desa Jelutung II, karena banyak terjadi di daerah-daerah luar terdapat bahan material atau bangunan yang rusak pada saat pengiriman barang yang dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh dan jalan yang kurang memungkinkan.

Selain itu kualitas dari bahan material juga merupakan salah satu faktor pendukung program BSPS di Desa Jelutung II. Bahan material yang diterima oleh masyarakat yang menerima bantuan memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu kelebihan dari program BSPS di Desa Jelutung II yang dimana diketahui banyak di kota-kota besar yang juga mendapatkan program BSPS salah satu kendala yang mereka hadapi yaitu mendapatkan kualitas barang yang kualitasnya kurang bagus. Kualitas suatu bahan bangunan atau barang dalam program BSPS menjadi salah persoalan yang serius. Apabila barang yang diterima memiliki kualitas yang kurang baik maka program tersebut dapat dikatakan kurang berhasil. Karena, dapat membahayakan calon penguin rumah tersebut.

### **2. Faktor penghambat**

Dalam faktor penghambat terdapat beberapa faktor, yaitu:

#### **a. Faktor cuaca**

Cuaca merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Apabila cuaca kurang bagus atau hujan maka pembangunan rumah tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan penguluran waktu bagi penerima bantuan. Karena, dalam proses pembuatan rumah penerima bantuan diberi waktu selama dua bulan untuk proses pembangunan rumah. Oleh karena itu cuaca yang buruk merupakan salah satu kendala dalam pembangunan rumah.

#### **b. Ketersediaan tukang**

Ketersediaan tukang juga merupakan salah satu faktor penghambat dari program BSPS. Karena, dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan kesulitan untuk mencari tukang untuk proses pembangunan rumah tersebut. Sehingga proses pembuatan mereka menjadi terhambat.

#### **c. Keterlambatan barang**

Keterlambatan barang dalam proses pengiriman kepada masyarakat yang menerima bantuan merupakan salah satu faktor kendala dalam program BSPS di Desa Jelutung II. Terdapat beberapa penerima yang mengalami keterlambatan barang tersebut yang cukup lama sehingga proses pembuatan atau pembangunan rumah sama sekali tidak berjalan. Oleh karena itu, proses pembangunan rumah tidak berjalan dengan efektif.

#### **d. Dana**

Dana merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan program BSPS di Desa Jelutung II. Banyak masyarakat yang menolak berkenaan dengan dana yang tidak mereka miliki. Keterbatasan dana dalam implementasi program BSPS dapat menghambat proses pembuatan rumah. Banyak kejadian dimana dana merupakan suatu persoalan

yang serius dalam program BSPS dimana penerima seringkali menunda pembangunan karena kurangnya bahan bangunan karena pembuatan rumah yang terlalu besar sehingga mereka menggu mendapatkan uang terlebih dahulu untuk melanjutkan pembangunan. Akan tetapi dana tersebut akan cukup apabila pembangunan rumah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan. Apabila masyarakat membuat rumah sesuai yang telah dianjurkan maka dana tersebut dapat dikatakan cukup untuk membuat satu rumah tersebut. Walaupun ada tambahan, tambahan tersebut tidak akan terlalu besar apabila mengikuti anjuran yang tertera dalam peraturan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Dari hasil penelitian peneliti dengan judul “Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020” yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan dari politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut yaitu:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup beberapa indikator sebagai berikut :

a. Kepentingan kelompok sasaran (*target group*)

Dalam indikator kepentingan kelompok sasaran sudah dicantumkan dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Pasal 1 Ayat 1 telah disebutkan bahwa target atau sasaran dari program BSPS merupakan Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki atau menempati rumah yang layak huni dengan lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada indikator ini dalam program BSPS mengenai sasaran atau *target group* sudah sangat jelas dalam peraturan tersebut.

b. Jenis dan manfaat yang diterima oleh *target group*

Adapun manfaat yang diperoleh dalam program BSPS di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dapat dirasakan oleh penerima dari program tersebut. Dimana mereka merasakan rumah menjadi lebih nyaman, aman, dan bersih. Sebab dari itu, dalam indikator ini dalam program BSPS dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan sangat membantu.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dalam program BSPS ialah, mengharapkan kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat menciptakan hidup sehat dan kemudian dapat memberikan semangat dalam bekerja. Karena dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan mengharapkan dapat merubah status keluarga.

d. Letak sebuah program

Letak sebuah program masih kurang tepat. Terdapat penerima yang tidak masuk kedalam kategori penerima bantuan dari program BSPS. dikarenakan, dalam pemilihan calon penerima bantuan perangkat Desa yang bertanggung jawab lebih memprioritaskan keluarga, kerabat dekat dan teman. Dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam penentuan calon penerima bantuan dan kurangnya transparansi dari perangkat Desa.

e. Pelaksana atau implementor

Pelaksana program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, PUPR Kabupaten untuk mensurvei masyarakat, tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang bertugas untuk mendampingi masyarakat yang menerima bantuan dan pengarahan kepada masyarakat. Terakhir perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa tersebut yang bertugas untuk memilih atau mendata calon penerima bantuan. namun dalam melaksanakan tugasnya masih kurang efektif.

f. Sumber daya

Dalam program BSPS adapun sumber daya yang digunakan yaitu, SDM dan Non SDM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan dalam program BSPS ialah, PUPR Kabupaten, TFL dan Perangkat Desa. sedangkan Non SDM yaitu perlengkapan atau alat untuk pembangunan rumah, seperti semen, batako, pasir, dan lain-lainnya. Non SDM yang dikerahkan dalam program BSPS di Desa Jelutung II memiliki kualitas yang bagus.

2. Berdasarkan lingkungan kebijakan (*context of implementation*)

a. Kekuasaan dan strategi aktor

Masih kurang sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor atau pelaksana dari program BSPS di Desa Jelutung II. Dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada masyarakat dan TFL mengenai sosialisasi dari program tersebut. Dan kurang memanfaatkan kekuasaan dengan baik.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa di Desa Jelutung II dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada proses pelaksanaan program BSPS. karakteristik lembaga dan penguasa belum begitu baik terhadap beberapa masyarakat.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana masih kurang efektif. Dikarenakan dalam peraturan kementerian PUPR No 07 Tahun 2018 tentang program BSPS masih terdapat beberapa point-point penting yang diabaikan oleh para implementor atau pelaksana dari program BSPS di Desa Jelutung II.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program BSPS di Desa Jelutung II sebagai berikut. Faktor pendukung implementasi program BSPS yaitu, kualitas bahan bangunan yang diterima oleh masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambat dari proses implementasi program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, cuaca, kesediaan tukang, keterlambatan barang, dan dana yang kurang cukup.

## B. Saran

Dari hasil akhir dalam skripsi ini peneliti mengajukan berbagai saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak PURP Kabupaten, TFL dan Desa, dapat memaksimalkan kembali sosialisasi mengenai program BSPS. sehingga seluruh kalangan yang di masyarakat dapat mengetahui adanya program tersebut.
2. Dapat memperbaharui data kemiskinan setiap tahun, sehingga pendistribusian program BSPS dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan penerima bantuan.

Libatkan peran ketua RT dan BPD dalam pelaksanaan dari program tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Saifuddin. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Edisi Dua, Jakarta Erlangga
- Martono, Nanang. 2025. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Cetakan Pertama. Jakarta: GP Press Group.
- Nurdin, Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo. Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. Menyusun Proposal Penelitian. Pangkalpinang: UBB Press.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono. 2021. Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Alfabeta: Bandung
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

- Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung). Bandung: Nusa Media
- Jurnal dan Skripsi
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Universitas Negeri Makassar
- Arwana, I Gede dan Karmini. 2018. Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentas Kemiskinan di Kecamatan Tejakula Buleleng. Universitas Udayana Bali.
- Aziz, Muhammad I A. 2019. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Universitas Sriwijaya Indralaya. Palembang.
- Esariti Landung, Dkk. 2020. Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hutasoit, Pryda R. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Indahyani dan badriah Sitti. 2020. Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentas Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majane) Universitas Sulawesi Barat.
- Kasmawati, dkk. 2019. Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Universitas Islam Kalimantan
- Maya, Desa Sari. 2019. Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Salitonga, Romauly. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.
- Suciati, Annisa. 2017. Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Sumber Lainnya
- Bps.go.id: [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1242/sdgs\\_11/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1242/sdgs_11/1) (Diakses 12/04/2021, 01:10)
- Bisnis.com : <https://m.bisnis.com/amp/read/20201216/47/1331815/begini-peran-penting-tfl-dalam-program-bedah-rumah> (Diakses 17/06/2021, 23:15)
- Klikbabel.com : <https://klikbabel.com/2019/01/31/383-unit-rumah-bangka-selatan-terima-bantuan-program-layak-huni> (Diakses 08/03/2021, 20:37)
- TribunNews.com: [https://mtribunnewscom.cd.n.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2021/11/19/ump-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naikrp34859?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&sqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D%#aoh=1640970829623&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fregional%2F2021%2F11%2F19%2Funp-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naik-rp-34859](https://mtribunnewscom.cd.n.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2021/11/19/ump-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naikrp34859?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&sqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D%#aoh=1640970829623&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fregional%2F2021%2F11%2F19%2Funp-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naik-rp-34859) (Diakses 01/01/2022, 1:45)
- UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 1 Ayat 6.
- Peraturan PUPR No 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)




## **INDEKS AFILIASI**

Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	1
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Yogyakarta, Indonesia	17
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	24
BKKBN Provinsi Banten Banten, Indonesia	31
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	38



Inovbook Publications

 <https://www.inovbook.com>

 [contact@inovbook.com](mailto:contact@inovbook.com)